

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPBAP Ujung Batee Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada BPBAP Ujung Batee dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi BPBAP Ujung Batee dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Aceh Besar, 23 Januari 2026



Wawan Cahyono Ashuri



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu LKj Ditjen Perikanan Budi Daya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ida Widaningsih SH

NIP.197801102002122004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	8
2.1. Sasaran Kegiatan.....	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	8
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025.....	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Analisis Capaian Kinerja	13
1. SK-1: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	13
2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	15
3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	25
4. SK-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee.....	26
3.3. Kinerja Anggaran.....	44
BAB 4. PENUTUP	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan.....	3
Tabel 2. Penetapan kinerja tahun 2025.....	9
Tabel 3. Capaian indikator tahun 2025.....	12
Tabel 4. Capaian Indikator: Sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat.....	13
Tabel 5. Capaian Indikator: Persentase bantuan calon induk	15
Tabel 6. Capaian Indikator: Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang	17
Tabel 7. Perbandingan capaian bantuan benih ikan payau/udang	17
Tabel 8. Capaian Indikator: Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi	18
Tabel 9. Perbandingan capaian produksi calon induk udang/ikan payau	19
Tabel 10. Capaian Indikator: Pakan ikan air payau yang diproduksi	20
Tabel 11. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri	20
Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel penyakit ikan yang diuji	21
Tabel 13. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji...	22
Tabel 14. Capaian Indikator: Pengujian antimikrobia resisten	23
Tabel 15. Perbandingan capaian sampel mikrobial resisten	23
Tabel 16. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan.....	25
Tabel 17. Perbandingan capaian bantuan benih ikan laut disalurkan.....	25
Tabel 18. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP	26
Tabel 19. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN	29
Tabel 20. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian temuan BPK	30
Tabel 21. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan.....	31
Tabel 22. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK..	33
Tabel 23. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	34
Tabel 24. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran.....	36



Tabel 25. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM	38
Tabel 26. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik.....	39
Tabel 27. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran.....	41
Tabel 28. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal	42
Tabel 29. Capaian Indikator: Persentase rencana umum pengadaan.....	43
Tabel 30. Pagu anggaran tahun 2021-2025	44
Tabel 31. Kendala dan rencana aksi 2025.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee	2
Gambar 2. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan	4
Gambar 3. Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan	4
Gambar 4. Potensi perikanan budidaya.....	5
Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku tahun 2025	11
Gambar 6. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2020-2025.....	14
Gambar 7. Calon induk yang disalurkan	15
Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk unggul 2020-2025	18
Gambar 9. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2020-2025	22
Gambar 10. Persentase resistensi antibiotik	24
Gambar 11. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB.....	27
Gambar 12. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis	29
Gambar 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) unit pelaksana teknis	35
Gambar 14. Nilai kinerja perencanaan anggaran unit pelaksana teknis	37
Gambar 15. Indeks pengelolaan SDM unit pelaksana teknis	38
Gambar 16. Pelayanan keterbukaan informasi publik unit pelaksana teknis	40
Gambar 17. Nilai pengawasan kearsipan internal unit pelaksana teknis.....	42
Gambar 18. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2025	45
Gambar 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025	45
Gambar 20. Target dan Realisasi PNPB Tahun 2021-2025	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPBAP Ujung Batee Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan. Selain itu, sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Untuk wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas maka dilakukan perjanjian kinerja sebagai pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur, serta didukung sumber daya anggaran yang memadai. Alokasi anggaran tahun 2025 awalnya sebesar Rp 17.194.338.000, setelah berjalannya waktu mengalami realokasi ke satker lain, sehingga pagu akhir sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.926.432.000 dengan realisasi Rp 15.497.649.820 (90,13 %). Selain itu penetapan rencana kerja tahun tingkat eselon I mengakibatkan penyesuaian perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja revisi terakhir pada bulan Desember 2025 telah ditetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dan 20 indikator kinerja, dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPBAP Ujung Batee sampai dengan Tahun 2025 sesuai aplikasi “kinerjaku” adalah sebesar 105,64 %. Dari 20 indikator kinerja yang telah dilaksanakan dan dilakukan pengukuran capaian terdapat 19 indikator telah mencapai target yaitu:

1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %.
2. Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat tercapai 108,28 %.
3. Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat tercapai 101,46 %.
4. Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee tercapai 110,68 %.
5. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 149,25 %.
6. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %.
7. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 689,02 %.
8. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 101,43 %.
9. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 105,73 %.

10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee tercapai 100 %.
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 115,62 %.
12. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 104,57 %.
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 106,49 %.
14. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 132,87 %.
15. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 200 %.
16. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 124,63 %.
17. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 125 %.
18. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 118,47 %.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee tercapai 131,58 %.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target hanya ada satu, yaitu:

1. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee tidak ada capaian.

Pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja pada periode selanjutnya perlu senantiasa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud serta melakukan penyempurnaan kebijakan internal yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan perikanan budidaya secara berkelanjutan, karena diyakini dengan potensi dan kekuatan yang ada, perikanan budidaya mampu memberi kontribusi pada misi Asta Cita pemerintah, diantaranya mewujudkan Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2025-2029. Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam beberapa perspektif dengan masing-masing indikator kinerja seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

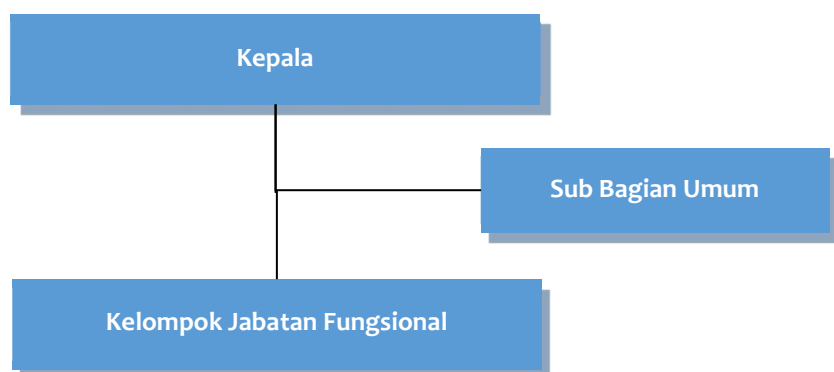
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Balai Budidaya Perikanan Air Payau Ujung Batee (BPBAP) Ujung Batee. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBAP Ujung Batee Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan

yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya ke depan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya, disebutkan bahwa tugas Balai Budidaya Perikanan Air Payau (salah satunya BPBAP Ujung Batee) adalah ***“melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya air payau”***. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BPBAP Ujung Batee mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya air payau;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Ujung Batee

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau terdiri atas: a) Subbagian Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan

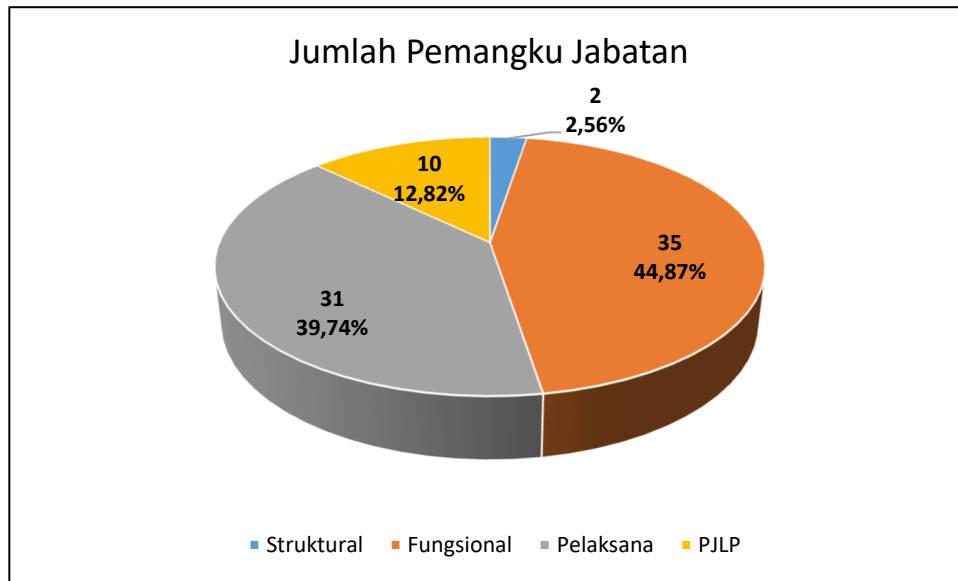
penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Total keseluruhan pegawai BPBAP Ujung Batee sebanyak 78 orang, dengan rincian status PNS sebanyak 41 orang dan PPPK sebanyak 26 orang dan PJLP sebanyak 10 orang. Pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh fungsional tertentu sebanyak 35 orang, sementara pelaksana hanya sebanyak 41 orang, PJLP sebanyak 10 orang, dan pejabat struktural 2 orang.

Tabel 1. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

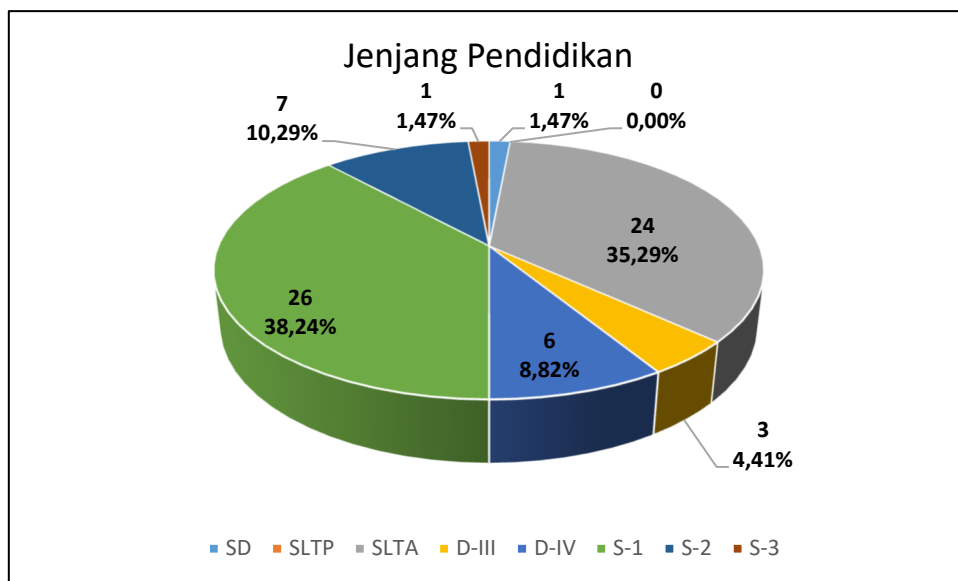
No	Jabatan	Nama/Jenjang Jabatan		PNS (orang)	PPPK (orang)	PJLP (orang)
1	Struktural	1	Kepala Balai	1		
		2	Kepala Sub Bagian Umum	1		
2	Fungsional	1	Analisis Akuakultur Ahli Madya	1		
		2	Analisis Akuakultur Ahli Muda	8		
		3	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	3	7	
		4	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	2		
		5	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1	2	
		6	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		
		7	Teknisi Akuakultur Mahir	4		
		8	Teknisi Akuakultur Pemula		2	
		9	Teknisi Akuakultur Terampil	2		
		10	Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	1		
		11	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	1		
3	Pelaksana	1	Analisis Tata Usaha	1		
		2	Operator Layanan Operasional		9	
		3	Penata Layanan Operasional		1	
		4	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1		
		5	Pengadministrasi Perkantoran		3	
		6	Pengelola Keuangan	1		
		8	Pengelola Laboratorium	1		
		9	Pengelola Layanan Operasional		1	
		10	Pengelola Surat	1		
		11	Pengelola Umum Operasional		1	
		12	Penyusun Laporan Keuangan	1		
		13	Teknisi Listrik dan Jaringan	1		
		14	Teknisi Perikanan Budidaya	9		
		15	PJLP			10
Jumlah				42	26	10



Gambar 2. Sumber daya manusia berdasarkan jabatan

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPAP Ujung Batee adalah sebagai berikut:

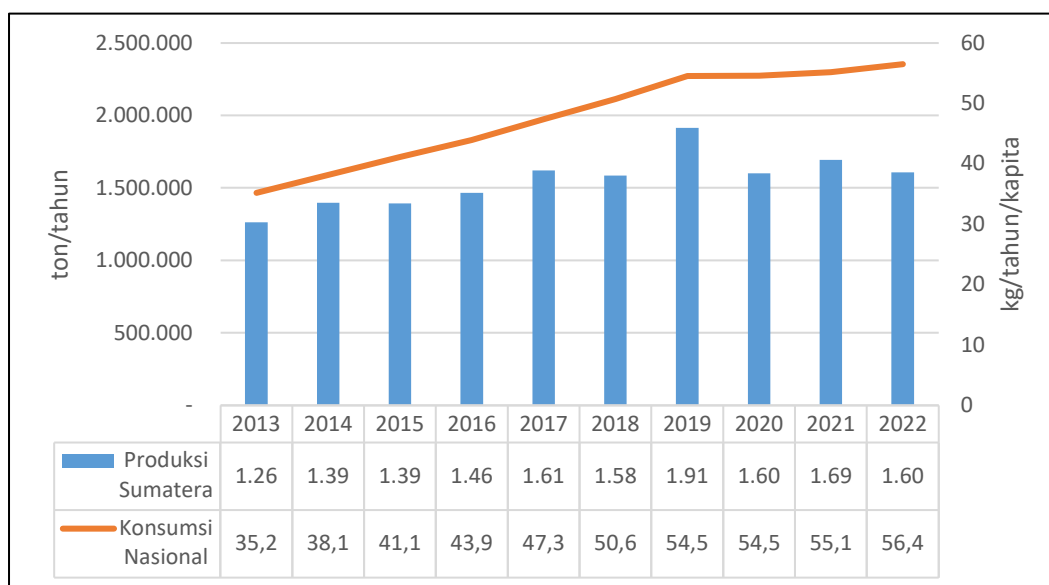
- S3 sebanyak 1 orang atau 1,47 % dari jumlah SDM
- S2 sebanyak 7 orang atau 10,29 % dari jumlah SDM
- S1 sebanyak 26 orang atau 38,24 % dari jumlah SDM
- D4 sebanyak 6 orang atau 8,82 % dari jumlah SDM
- D3 sebanyak 3 orang atau 4,41 % dari jumlah SDM
- SLTA sebanyak 24 orang atau 35,29 % dari jumlah SDM
- SLTP sebanyak tidak ada
- SD sebanyak 1 orang atau 1,47 % dari jumlah SDM.



Gambar 3. Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan Perikanan Budidaya

Selama 10 tahun terakhir konsumsi ikan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 60,41 %, tahun 2013 hanya 35,2 kg/tahun/kapita menjadi 56,4 kg/tahun/kapita di 2022. Sementara volume produksi perikanan budidaya untuk wilayah Sumatera (sebagai wilayah kerja BPBAP Ujung Batee) hanya meningkat sebesar 27,25 % dari tahun 2013 hanya 1,26 juta ton/tahun menjadi 1,6 juta ton/tahun di 2022, tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan konsumsi ikan nasional yang mencapai peningkatan sebesar 60,41 % (sumber data diolah dari <https://statistik.kkp.go.id>). Adanya ketimpangan antara kebutuhan konsumsi ikan nasional dengan volume produksi menjadi potensi bagi BPBAP Ujung Batee untuk mendukung peningkatan volume produksi, melalui penyediaan induk dan benih yang berkualitas maupun bimbingan teknis perikanan budidaya.



Gambar 4. Potensi perikanan budidaya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan internal dan eksternal.

- a. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (v) pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vi) cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan) belum optimal diterapkan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan (vii) kondisi

infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

- b. Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) ruang untuk usaha perikanan budi daya belum ada kepastian memadai, (ii) regulasi dan perizinan lintas sektoral belum begitu simetrik sehingga menghambat perkembangan usaha perikanan budi daya, dan (iii) perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik lagi permasalahan yang dihadapi BPBAP Ujung Batee yaitu adanya ketimpangan antara sumber daya (baik SDM maupun dukungan anggaran) dengan luas wilayah kerja. Wilayah kerja BPBAP Ujung Batee mencakup seluruh Sumatera yang begitu luas. Anggaran hanya cukup mengakomodir kegiatan di Aceh dan Sumut, selain itu instalasi budi daya perikanan BPBAP Ujung Batee hanya satu dan berada di Aceh Besar, sehingga sulit untuk menjangkau wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, maupun Lampung.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, telah dirangkum beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaian target-target kinerja pada tahun tersebut, yaitu:

1. Sumber daya manusia: jumlah pegawai terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik pensiun maupun mutasi, sementara penambahan dari pengadaan CPNS/PPPK maupun dari mutasi dari instansi lain tidak sebanding.
2. Pendidikan dan latihan: ketersediaan pendidikan dan latihan masih terbatas dan kurang variatif terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
3. Sarana dan prasarana: baik gedung, kolam, maupun peralatan butuh banyak pemeliharaan, jika terus digunakan akan mempengaruhi kualitas output.
4. Kebijakan yang terus berubah: perkembangan zaman, tuntutan publik, maupun perkembangan teknologi mendorong perubahan kebijakan. Sementara untuk memenuhi hal tersebut butuh waktu sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pada periode tersebut

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPBAP Ujung Batee Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBAP Ujung Batee selama kurun waktu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.



2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBAP Ujung Batee serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBAP Ujung Batee, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, serta pengukuran/pengelolaan kinerja BPBAP Ujung Batee.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi indikator kinerja BPBAP Ujung Batee serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Sesuai Rencana Kerja Anggaran bahwa BPBAP Ujung Batee memiliki sasaran kegiatan yaitu Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut, Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar, dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen. Sehingga dapat dijabarkan bahwa sasaran kegiatan menjadi

- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau
- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut
- Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja telah dilakukan beberapa langkah, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja (PK); dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja BPBAP Ujung Batee tahun 2025 dituangkan dalam perjanjian kinerja (sebagai mana terlampir pada Lampiran 1).

Seiring berjalannya tahun anggaran terjadi perubahan rencana kerja terkait adanya blokir wujud dari kebijakan efisiensi anggaran, dan kemudian adanya pergeseran anggaran antar satuan kerja. Maka pada triwulan keempat dilakukan perubahan perjanjian kinerja (perubahan terlampir pada Lampiran 3). Perubahan dilakukan pada indikator kinerja kegiatan maupun volume target (matriks perubahan terlampir pada Lampiran 4). Adapun indikator kinerja dan target setelah perubahan sebagai berikut:



Tabel 2. Penetapan kinerja tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	SATUAN
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	15	Unit
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2.	Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/ udang yang disalurkan ke masyarakat	1.847	Ekor
		3.	Jumlah bantuan benih ikan air payau/ udang yang disalurkan ke masyarakat	2.504.380	Ekor
		4.	Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee	20.176	Ekor
		5.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.465	Kg
		6.	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	469	Sampel
		7.	Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee	14	Sampel
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	8.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	29.121	Ekor
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai
		10.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	Indeks
		11.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen
		12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen
		13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92	Nilai
		15.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,5	Nilai
		16.	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	Indeks
		17.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	Nilai
		18.	Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	Persen
		19.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	Nilai
		20.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee	76	Persen

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPAP Ujung Batee mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BPAP Ujung Batee) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukung dilakukan verifikasi oleh level I.

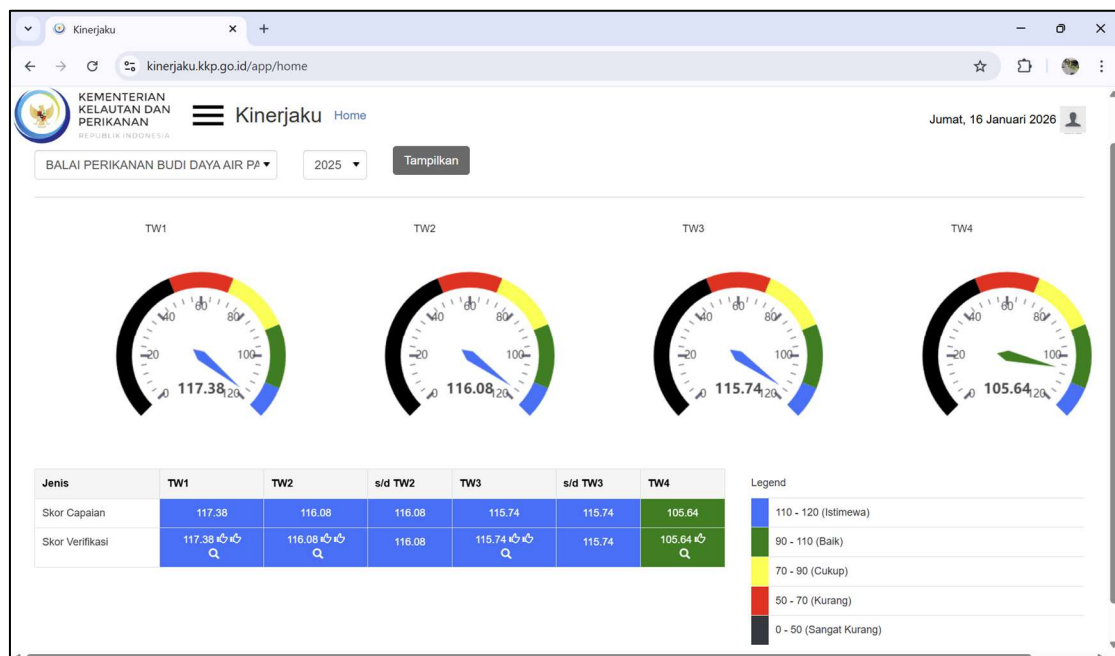
Status capaian Indikator Kinerja yang ada dalam aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> ditunjukkan dengan warna: (i) hitam, kategori sangat kurang (untuk nilai <50); (ii) merah, kategori kurang (nilai 50 - <70); (iii) kuning, kategori cukup (nilai 70 - <90); (iv) hijau, kategori baik (nilai 90 - <110); dan (v) biru, kategori istimewa (nilai 110 – 120).

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implemementasi aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada Tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPBAP Ujung Batee menitikberatkan pada 4 Sasaran Kegiatan dengan 20 indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKJ). Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” diperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 105,64. Adapun rekapitulasi capaian kinerja BPBAP Ujung Batee pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.



Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Kinerjaku tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id>, terlihat bahwa Nilai Capaian Kinerja BPBAP Ujung Batee sebesar 105,64 yang berada dalam kategori BAIK. Artinya secara umum indikator kinerja sudah mencapai target.

Capaian target indikator kinerja Tahun 2025 ada 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator kinerja: Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor). Sementara target indikator kinerja yang mencapai dan melebihi target sebanyak 19 indikator. Secara umum indikator kinerja BPBAP Ujung Batee telah tercapai. Begitu pun pada capaian kinerja secara keseluruhan terlihat capaian target mencapai 105,64 (dapat dilihat pada Gambar 5).

Tabel 3. Capaian indikator tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	15	15	100,00
2	Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	1.847	2.000	108,28
3	Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	2.504.380	2.540.859	101,46
4	Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	20.176	22.330	110,68
5	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	10.465	0	0,00
6	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	469	700	149,25
7	Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14	14	100,00
8	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	29.121	200.650	689,02
9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	85,20	101,43
10	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	85,64	105,73
11	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	100	100,00
12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	98,28	115,62
13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	79,47	104,57
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92	97,97	106,49
15	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,5	95	132,87
16	Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	6	200,00
17	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	99,7	124,63
18	Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	100	125,00
19	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	82,93	118,47
20	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee	76	100	131,58

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut:

1. SK-1: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar

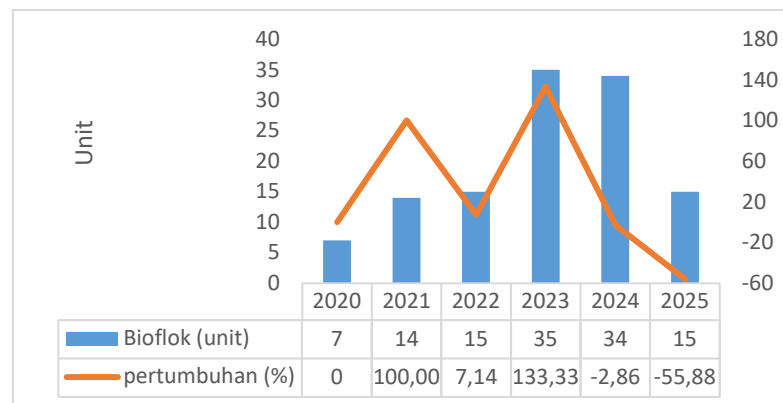
IK-1: Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berupa sarana budidaya sistem bioflok, dan mesin pakan beserta bahan baku. Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi unit sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan oleh BPBAP Ujung Batee. Jumlah sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan.

Tabel 4. Capaian Indikator: Sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (unit)	2021 (unit)	2022 (unit)	2023 (unit)	2024 (unit)	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)	
7	14	15	35	33	15	15	100	45.45

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada tahun 2025, sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat sudah sepenuhnya selesai disalurkan ke masyarakat mencapai realisasi sebanyak 15 paket atau 100 % dari target 15 paket. Sarana produksi bioflok yang telah selesai diserahkan yaitu konstruksi fisik, peralatan, bahan operasional seperti benih, pakan, dan obat-obatan. Realisasi jumlah target sarana produksi bioflok pada tahun 2025 yang disalurkan ke masyarakat mengalami penurunan (45,45 %) jika dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini berdasarkan pertimbangan pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB untuk indikator ini, hanya BPBAP Takalar yang memiliki target dan realisasi di tahun 2025 dengan capaian 100% sedangkan BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki indikator kinerja sarana budidaya air tawar yang disalurkan ke masyarakat.



Gambar 6. Perkembangan sarana produksi Bioflok yang disalurkan 2020-2025

Data *time series* menunjukkan sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan jumlah paket bantuan. Dimulai dari tahun 2020 mampu menyalurkan 7 paket sarana produksi bioflok, 14 paket pada tahun 2021, 15 paket pada tahun 2022, 35 paket pada tahun 2023, 33 paket pada tahun 2024, dan 15 paket pada tahun 2025. Adapun peningkatan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 133,33 % sarana produksi bioflok yang tersalurkan ke masyarakat. Terlihat penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2025 mencapai titik terendah sebesar 55,88 % namun capaian jumlah paket sarana produksi bioflok yang tersalurkan telah memenuhi target tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran sarana produksi bioflok yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 3.114.071.000 dengan realisasi mencapai Rp 3.114.067.194 yaitu seratus persen terealisasi. Anggaran tersebut sudah termasuk belanja barang non operasional, biaya identifikasi, verifikasi, monitoring calon penerima sarana produksi bioflok, dan pengadaan sarana produksi bioflok itu sendiri. Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi sarana produksi Bioflok yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output dan realisasi anggaran mencapai 100 %. Sarana budidaya yang disalurkan ke masyarakat berupa sarana budidaya ikan system bioflok untuk ikan lele dan ikan nila.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Kondisi cuaca berupa angin kencang sangat mempengaruhi pekerjaan pembangunan sarana produksi bioflok sehingga untuk memperkuat rangka bangunan utama perlu ditambahkan rangka pendukung bangunan berupa pemasangan tiang penyangga tambahan untuk memperkokoh tiang rangka bangunan bioflok.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Terjadi banjir di beberapa lokasi: Aceh Utara, Langsa dan Kalimantan Barat sehingga menghambat pengerjaan pembangunan bioflok.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Merekomendasikan agar peralatan dan bahan bioflok yang tidak berkaitan dengan lokasi (pengerjaan fisik) agar segera diadakan dan dititipkan disekitar lokasi kelompok (lokasi yang tidak terdampak banjir) sehingga memudahkan mobilisasi bahan material dan bahan lainnya pada saat banjir surut.

2. SK-2: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau

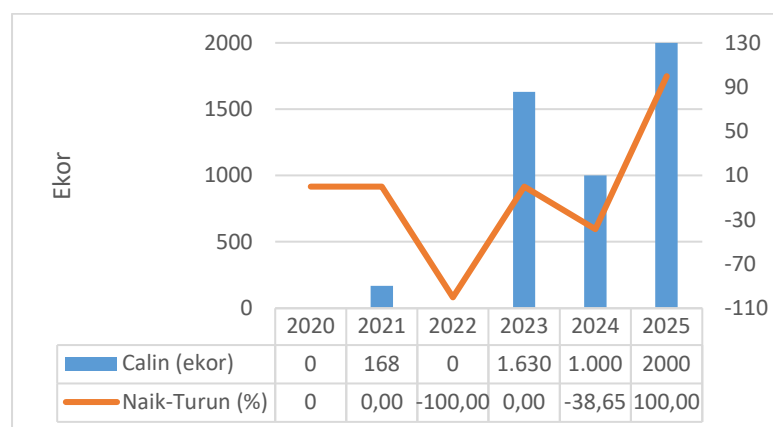
IK-2: Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat

Indikator kinerja ini mengukur jumlah calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan oleh BPBAP Ujung Batee kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan. Spesifikasi calon induk ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk ikan unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk ikan Bandeng telah mencapai berat 300 gram dan untuk udang berat 25 gram.

Tabel 5. Capaian Indikator: Persentase bantuan calon induk

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	2024 (ekor)	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	
0	168	0	1.630	1.000	1.847	2.000	108,28	200,00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat mampu mencapai sebanyak 2.000 ekor atau 108,28 % dari target 1.847 ekor. Realisasi jumlah calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 mengalami peningkatan (200 %) jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.



Gambar 7. Calon induk yang disalurkan

Data *time series* (2020-2025) menunjukkan realisasi capaian calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat mengalami kenaikan dan penurunan jumlah bantuan. Dimulai dari tahun 2021 mampu menyalurkan 168 ekor calon induk; 1.630 ekor calon induk pada tahun 2023; 1.000 ekor calon induk pada tahun 2024; dan 2.000 ekor pada tahun 2025, Adapun peningkatan nilai tertinggi terdapat pada tahun 2025 sebesar 100 % bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat. Terlihat penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai titik terendah sebesar 100 % karena tidak terdapat capaian penyaluran calon induk ke masyarakat.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 102.283.000 dengan realisasi mencapai sebesar Rp 102.278.500 (100 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi output maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisiensi, karena realisasi calon induk yang disalurkan ke masyarakat sebesar 108,28 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 100 %. Komoditas calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun ini hanya calon induk udang.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Melakukan cut off sebagai upaya penyesuaian jumlah pakan yang tersedia dengan jumlah calon kakap putih yang dipelihara. Kemudian melakukan pengkayaan pakan agar calon ikan kakap tumbuh secara maksimal dengan pemberian jumlah pakan yang cukup berdasarkan Biomassa, pergantian air secara rutin dan kontrol kualitas berkala.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap capaian Calon Ikan kakap, sehingga dilakukan cut off untuk menyesuaikan jumlah pakan ikan segar yang tersedia. Pemberian Pakan yang belum maksimal, juga mengakibatkan bobot ikan mengalami pelambatan pertumbuhan dari bobot ideal atau yang standar. Perlu dilakukan kaji ulang untuk menyesuaikan jumlah target dan capaian yang selaras dengan biaya pendukung yang dibutuhkan.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Pemeliharaan calon ikan kakap membutuhkan jumlah pakan yang cukup sehingga asupan gizi juga maksimal, jumlah dan kualitas pakan Calon Ikan kakap harus terpenuhi secara kontinyu. Kualitas pakan harus masuk kategori ikan segar. Penghematan anggaran sangat berdampak terhadap capaian IKU sehingga untuk periode berikutnya perlu penyesuaian antara target IKU dan sistem penganggaran secara maksimal.

IK-3: Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat

Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau/udang yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah

cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau/udang yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Bandeng telah mencapai ukuran 1 cm, benih ikan Nila Salin telah mencapai ukuran 2 cm, benih udang Windu telah mencapai ukuran PL10, serta benih udang Vaname telah mencapai ukuran PL8.

Tabel 6. Capaian Indikator: Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	2024 (ekor)	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	
10.642.950	8.964.440	4.738.700	8.481.510	8.180.360	2.504.380	2.540.859	101,46	31,06

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Bantuan benih ikan payau/udang yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 mampu mencapai sebanyak 2.540.859 ekor atau 101,46 % dari target 2.504.380 ekor. Realisasi bantuan benih ikan air payau/udang yang tersalurkan pada tahun 2025 mengalami penurunan (31,06 %) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Realisasi dari 2020-2025 mengalami peningkatan dan penurunan capaian, hal ini terkait dengan adanya pengurangan atau realokasi anggaran kegiatan produksi benih ikan air payau/udang.

Tabel 7. Perbandingan capaian bantuan benih ikan payau/udang

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	2.504.380	2.540.850	101,46
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	16.350.633	16.369.000	100,11

Realisasi bantuan benih ikan payau/udang yang disalurkan tidak dapat dibandingkan antara UPT ikan payau DJPB. Hanya BPBAP Ujung Batee dan BPBAP Takalar yang memiliki indikator kinerja ini, sedangkan BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki indikator capaian bantuan benih ikan payau/udang yang disalurkan ke masyarakat.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 160.450.000 dengan realisasi mencapai Rp 160.397.469 (99,98 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi benih yang disalurkan ke masyarakat maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sudah efisien, karena realisasi output sebesar 101,46 % begitu juga realisasi anggaran tidak jauh berbeda hanya 99,98 %. Komoditas benih ikan payau/udang yang disalurkan pada tahun ini yaitu benih ikan bandeng, benih ikan nila dan benih udang.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan pengkayaan pakan induk bandeng dan pembersihan atap ruangan pembenihan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Produksi masih rendah dikarenakan telur induk bandeng masih terbatas. Selain itu karena keterbatasan anggaran sehingga tidak maksimal dalam kegiatan produksi benih.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rencana aksi ke depan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi proses produksi benih serta memaksimalkan fasilitas yang tersedia sehingga mampu meningkatkan produksi telur dan fertilitas telur bandeng dengan tujuan menghasilkan benih yang sesuai dengan standar persyaratan penyaluran ke masyarakat.

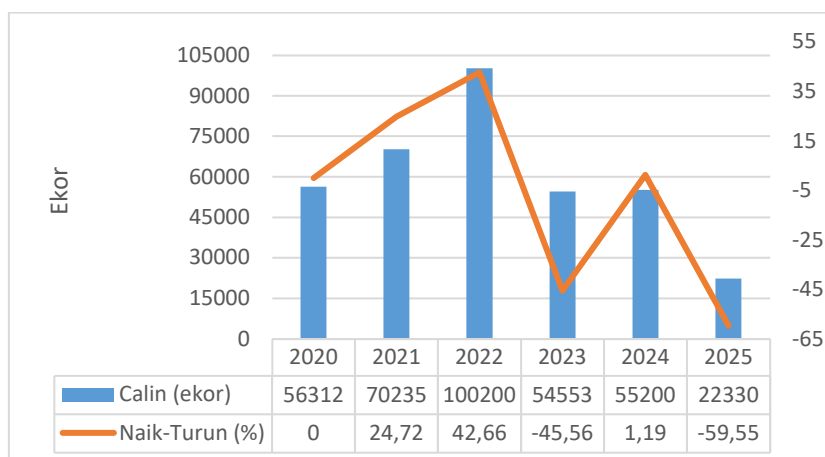
IK-4: Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang dihasilkan oleh BPAP Ujung Batee. Spesifikasi calon induk udang secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, mempunyai deskripsi yang jelas, yaitu jenis dan varietas induk udang unggul, bentuk tubuh normal dan tidak cacat yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap, dan ukuran calon induk udang telah mencapai berat 25 gram.

Tabel 8. Capaian Indikator: Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi

Realisasi 2020-2024					2025		Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	2024 (ekor)	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	
56,312	70,235	100,200	54,553	55,200	20,176	22,330	110.68
							40.45

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Calon induk unggul yang diproduksi mampu mencapai sebanyak 22.330 ekor atau 110,68 % dari target 20.176 ekor. Realisasi jumlah calon induk unggul yang diproduksi pada tahun 2025 mengalami penurunan (40,45 %) jika dibandingkan dengan tahun 2024, hal ini berdasarkan pertimbangan pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Perkembangan calon induk unggul yang diproduksi disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 8. Perkembangan produksi calon induk unggul 2020-2025

Data *time series* 2020-2025 menunjukkan calon induk unggul yang diproduksi mengalami peningkatan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2023 dan 2025. Dimulai dari produksi pada tahun 2020 mencapai sebanyak 56.312 ekor kemudian tahun 2021 sebanyak 70.235 ekor atau meningkat 24,72 %, dan puncaknya pada tahun 2022 mampu mencapai hingga 100.200 ekor atau meningkat 42,66 %. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 45,56 % atau terproduksi hanya 54.553 ekor saja. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,19 % atau capaian produksi sebesar 55.200 ekor kemudian mengalami penurunan produksi pada tahun 2025 sebesar 59,55 % yaitu produksi calon induk sebanyak 22.330 ekor.

Tabel 9. Perbandingan capaian produksi calon induk udang/ikan payau

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	43.258	47.740	110,36
2	BPBAP Ujung Batee	20.176	22.330	110,68
3	BPBAP Situbondo	5.911	6.895	116,65
4	BPBAP Takalar			

Perbandingan capaian produksi induk unggul oleh BPBAP Ujung Batee tidak dapat dibandingkan dengan BPBAP Takalar yang memiliki capaian produksi calon induk unggul tergabung dengan untuk bantuan dan operasional UPT.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Calon induk unggul yang diproduksi pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 907.838.000 dengan realisasi mencapai Rp 784.577.000 (86,42 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi produksi calon induk maka dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efisien, karena realisasi output mencapai 110,68 % berbeda dengan realisasi anggaran hanya mencapai 86,42 %. Komoditas calon induk yang diproduksi pada tahun ini hanya calon induk udang.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Hasil pemeliharaan calon udang belum dapat tercapai pada triwulan III, disebabkan oleh kendala serangan penyakit WFD, sehingga menyebabkan produksi Calon induk udang belum maksimal. Demikian juga pada produksi udang konsumsi yang menjadi faktor pembatas adalah isu Cesium 137, terjadinya penolakan udang konsumsi dari Indonesia yang ditolak oleh otoritas BPOM (FDA) Amerika, sehingga beberapa *cold storage* tutup yang berakibat tidak terserapnya udang konsumsi dan mengakibatkan harga menurun secara drastis. Tindak lanjut atau rekomendasi yaitu melakukan survei pasar lokal untuk menjamin terserapnya hasil produksi udang konsumsi.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Produksi Calon induk udang Pada triwulan IV, terlihat capaian progres sudah sangat signifikan, pemeliharaan calon induk udang membutuhkan proses yang panjang untuk mencapai bobot maksimal yang dipersyaratkan, selain itu akses mendapatkan benih Calon induk udang sangat terbatas.

Rencana aksi ke depan/tahun berikutnya. Target perbaikan capaian dapat dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan calon induk udang lebih awal dilakukan, mulai dari pemesanan benur calon induk udang, persiapan wadah dan penebaran pada awal Triwulan I, sehingga target dapat tercapaian pada TW II. Hal ini juga sebagai antisipasi jika terjadi serangan penyakit, sehingga masih tersedia waktu untuk melakukan pemeliharaan tahap ke II.

IK-5: Pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee

Indikator kinerja ini merupakan data dan informasi produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan guna menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi. Tujuannya dalam rangka mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium yang ada di UPT untuk memproduksi pakan ikan dan memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia. Volume bahan baku pakan ikan yang tersedia adalah volume pakan ikan yang akan diproduksi ditambahkan estimasi loss/penyusutan bahan baku pakan yang terjadi selama proses produksi dan penyusutan kadar air bahan baku setelah dikeringkan $\pm 20\%$.

Tabel 10. Capaian Indikator: Pakan ikan air payau yang diproduksi

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (kg)	2021 (kg)	2022 (kg)	2023 (kg)	2024 (kg)	Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)	
85,800	27,086	45,800	50,600	57,800	10.465	0	0.00	0.00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pakan ikan yang diproduksi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 10.465 kg namun tidak terdapat realisasi produksi pakan karena anggaran untuk pencapaian indikator ini dalam status blokir sehingga anggaran tidak dapat digunakan untuk kegiatan produksi pakan. Tidak terlaksananya kegiatan produksi pakan mandiri pada tahun 2025 sehingga pemanfaatan persediaan produksi dari sisa pakan mandiri tahun 2024 dipergunakan untuk pemakaian internal dan penjualan serta terdapat penyusutan pada pakan.

Tabel 11. Perbandingan capaian produksi pakan mandiri

No	Satuan Kerja	Target (kg)	Realisasi (kg)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	47.681	77.478	162,49
2	BPBAP Ujung Batee	10.465	0	0
3	BPBAP Situbondo	26.197	0	0
4	BPBAP Takalar	8.325	8.530	102,46

Perbandingan capaian produksi pakan mandiri antar UPT Air Payau DJPB pada tahun 2025 terlihat bahwa capaian produksi pakan paling tinggi diperoleh oleh BBPBAP Jepara yaitu sebesar 162,49 %, selanjutnya capaian produksi pakan dari BPBAP Takalar sebesar

102,46 %. BPAP Ujung Batee dan BPAP Situbondo tidak memiliki capaian produksi pakan mandiri pada tahun 2025.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran pakan yang diproduksi untuk operasional pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 136.060.000 dan belum ada realisasi anggaran. Hal ini disebabkan seluruh alokasi anggaran tersebut termasuk dalam kebijakan penyesuaian belanja negara dan masih dalam status pemblokiran sehingga tidak dapat digunakan untuk produksi pakan mandiri pada tahun 2025.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Ketiadaan bahan baku untuk produksi pakan karena anggaran kegiatan masih terblokir sehingga tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Anggaran kegiatan produksi pakan mandiri masih dalam status blokir sehingga produksi pakan mandiri pada tahun 2025 belum dapat terlaksana.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Untuk melakukan tindak lanjut yang telah direkomendasikan dilakukan penganggaran ulang dan membuat perencanaan dari awal.

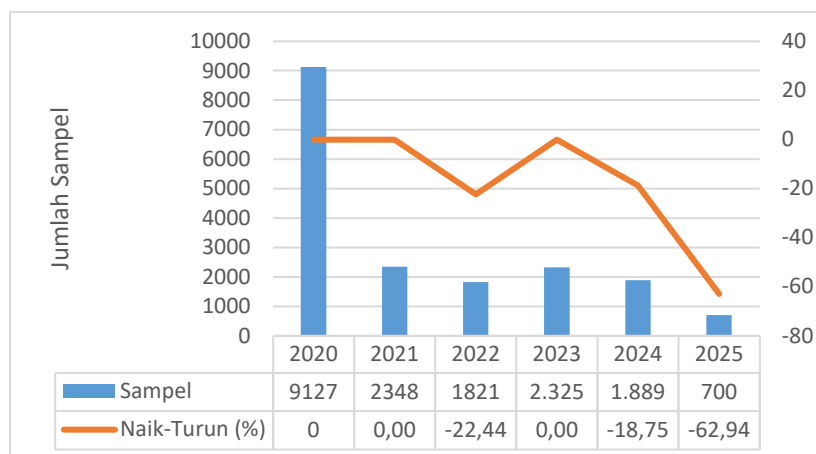
IK-6: Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPAP Ujung Batee

Layanan pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan BPAP Ujung Batee berdasarkan tujuan pemeriksaan terdiri dari pengujian Kualitas Air, Mikrobiologi, dan Biologi Molekuler. Jumlah yang dihitung sebagai capaian adalah banyak sampel pengujian yang masuk baik secara internal maupun eksternal, bukan berdasarkan banyaknya kegiatan pengujian di setiap parameter yang mampu diselesaikan oleh laboratorium uji. Jumlah capaian dihitung dari jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium).

Tabel 12. Capaian Indikator: Sampel penyakit ikan yang diuji

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	2023 (sampel)	2024 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)	
9,127	2,348	1,821	2,325	1,889	469	700	149.25	37.06

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi target pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan sudah melampaui sebesar 149,25% dari target 469 sampel. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahwa realisasi 2025 (469 sampel) lebih rendah dibanding pencapaian sampel pada tahun 2024 sebanyak 1.889 sampel. Realisasi pencapaian pengujian sampel laboratorium dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan tahun 2020-2025

Data *time series* menunjukkan pengujian sampel laboratorium mengalami peningkatan dan penurunan realisasi jumlah sampel pengujian. Capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan (22,444 %). Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi volume output kegiatan pengujian sampel. Pada tahun 2023, pengujian sampel laboratorium meningkat dibandingkan tahun 2022 walaupun masih lebih rendah dari tahun 2020-2021. Pada tahun 2024 dan 2025 kembali terjadi penurunan realisasi karena adanya pengurangan dan realokasi anggaran, selain itu pada tahun 2025 hanya parameter kualitas air yang memiliki anggaran kegiatan. Semua pelayanan pengujian sampel Adalah sampel kualitas air sebanyak 700 sampel untuk pengujian kualitas air secara kimia.

Tabel 13. Perbandingan capaian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	901	3.428	380,47
2	BPBAP Ujung Batee	469	700	149,25
3	BPBAP Situbondo	828	4.264	514,98
4	BPBAP Takalar	699	3.914	559,94

Perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB terkait kegiatan sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium pada tahun 2025, terlihat bahwa BPBAP Takalar (559,94 %) memiliki capaian tertinggi dibanding BPBAP Situbondo (514,98 %), BBPBAP Jepara (380,47 %), dan BPBAP Ujung Batee (149,25 %).

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 98.021.000 dengan realisasi mencapai Rp 98.013.627 (99,99 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan maka dapat dikatakan penggunaan anggaran sangat efisien, karena realisasi output mencapai 149,25 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,99 %.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Proses pengujian sampel telah dilakukan berdasarkan ruang lingkup dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Ujung Batee.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target pada TW IV, pelayanan pengujian sampel penyakit ikan air payau tetap berlangsung sebagai pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Ujung Batee.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melanjutkan proses pengujian sampel berdasarkan ruang lingkup dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Ujung Batee.

IK-7: Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee

Resistensi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba yang resisten. Jika semakin kecil tingkat resistensi antimikroba, maka semakin bagus pengendalian resistensi antimikroba.

Tabel 14. Capaian Indikator: Pengujian antimikrobial resisten

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (sampel)	2021 (sampel)	2022 (sampel)	2023 (sampel)	2024 (sampel)	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)	
0	0	35	56	37	14	14	100.00	37.84

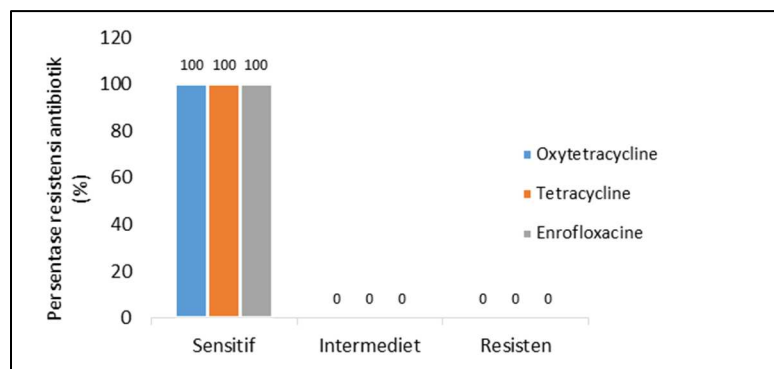
Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobial berhasil mencapai target tahun 2025 yaitu sebesar 100 %. Realisasi persentase pengujian sampel antimikrobial tahun 2025 mengalami penurunan 37,84 % jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran yang tersedia setelah efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau DJPB lainnya, capaian pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan capaian sampel mikrobial resisten

No	Satuan Kerja	Target (sampel)	Realisasi (sampel)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	27	71	262,96
2	BPBAP Ujung Batee	14	14	100
3	BPBAP Situbondo	22	44	200
4	BPBAP Takalar	15	20	133,33

Perbandingan capaian antar UPT Air Payau DJPB terlihat bahwa BBPBAP Jepara memiliki capaian tertinggi pengujian antimikrobal resisten yaitu mencapai 262,96 % dari target, sedangkan BPAP Ujung Batee memiliki capaian terendah hanya sebesar 100 %. Semua UPT Air Payau DJPB yang memiliki capaian pengujian antimikrobal resisten pada tahun 2025 telah melampaui target tahunan

Jenis sampel yang menjadi target kegiatan surveilan AMR tahun 2025 oleh Laboratorium BPAP Ujung Batee adalah komoditas udang. Dari total jumlah sampel hasil surveilan, sebagian besar sampel komoditas yang diperoleh adalah udang vannamei pada sistem budidaya pembesaran di tambak plastik dan tanah.



Gambar 10. Persentase resistensi antibiotik

Sebanyak 14 sampel dari hasil kegiatan surveilan AMR yang telah dilakukan pada tahun 2025, ditemukan 7 isolat *Vibrio parahaemolyticus* dari beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi Aceh. Ketujuh isolat yang teridentifikasi *V. parahaemolyticus* berasal dari udang pembesaran di tambak plastik dan tanah. Persentase resistensi isolat bakteri *V. parahaemolyticus* terhadap antibiotik menunjukkan bahwa ketujuh isolat bakteri *V. parahaemolyticus* masih sensitif terhadap antibiotik Oxytetracycline, Tetracycline, dan Enrofloxacin (100 %).

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Anggaran pengujian sampel antimikrobal resisten (AMR) pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp 12.796.000 dengan realisasi mencapai Rp 12.756.000 (99,69 %). Jika dibandingkan realisasi anggaran dengan realisasi pengujian sampel AMR maka dapat dikatakan penggunaan anggaran efisien, karena realisasi output mencapai 100 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,69 %.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Tindak lanjut telah dilakukan yaitu pelaporan hasil pengujian antimikrobal resisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target pada TW IV karena target capaian pengujian antimikrobal resisten telah tercapai pada TW III.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan pengambilan dan pengujian sampel antimikrobal resisten sesuai perencanaan.

3. SK-3: Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

IK-8: Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee

Benih ikan air laut adalah ikan yang hidup di perairan laut dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Benih yang disalurkan ke masyarakat sebagai bantuan benih ikan kepada masyarakat pembudidaya. Indikator kinerja ini mengukur jumlah ekor benih ikan air payau yang disalurkan sebagai bantuan oleh BPBAP Ujung Batee kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang dinilai berkomitmen dalam usaha pembudidayaan ikan dan mampu mengelola produksi pembesaran budi daya ikan air payau sesuai dengan kaidah-kaidah cara budi daya ikan yang baik. Kriteria benih ikan air payau yang akan disalurkan harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat, dan ukuran benih ikan Kakap Putih telah mencapai ukuran 2,5 cm.

Tabel 16. Capaian Indikator: Benih ikan air laut yang disalurkan

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)	2023 (ekor)	2024 (ekor)	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)	
6.000	97.450	64.950	347.200	164.500	29.121	200.650	689,02	121,98

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada tahun 2025 realisasi jumlah benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat telah tercapai 689,02 % atau sebanyak 200.650 ekor dari target 29.121 ekor. Jika dibandingkan dengan realisasi target tahun 2024 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 121,98 %. Jika dibandingkan dengan UPT Air Payau DJPB lainnya, capaian pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan capaian bantuan benih ikan laut disalurkan

No	Satuan Kerja	Target (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	BBPBAP Jepara	-	-	-
2	BPBAP Ujung Batee	29.121	200.650	689,02
3	BPBAP Situbondo	-	-	-
4	BPBAP Takalar	19.073	19.400	101,71

Perbandingan capaian benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat terlihat bahwa BPBAP Ujung Batee memiliki capaian lebih tinggi (689,02 %) dibandingkan BPBAP Takalar (101,71 %). BBPBAP Jepara dan BPBAP Situbondo tidak memiliki indikator kinerja benih ikan laut yang disalurkan ke masyarakat

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Benih ikan air laut yang disalurkan pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 174.722.000 dengan realisasi mencapai Rp 174.713.900 (100 %). Penggunaan dapat dikatakan sangat efisien, mengingat realisasi

anggaran 100 % dari total pagu benih ikan air laut yang disalurkan sementara realisasi output sudah jauh melampaui target tahunan. Komoditas Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun ini hanya benih ikan kakap putih.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Menyiapkan stok BBM untuk operasional genset saat pemadaman listrik berlangsung. Melakukan penurunan padat tebar saat pemeliharaan benih ikan agar tidak terjadi persaingan oksigen.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Operasional generator set belum normal untuk suplai oksigen sehingga hasil produksi pembenihan belum maksimal. Selain itu juga harus dilakukan penurunan padat tebar ikan sehingga mempengaruhi jumlah produksi.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Membuat perencanaan awal lebih baik dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi produksi sehingga diharapkan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Melakukan peningkatan padat tebar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

4. SK-4: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee

IK-9: Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPBAP Ujung Batee. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

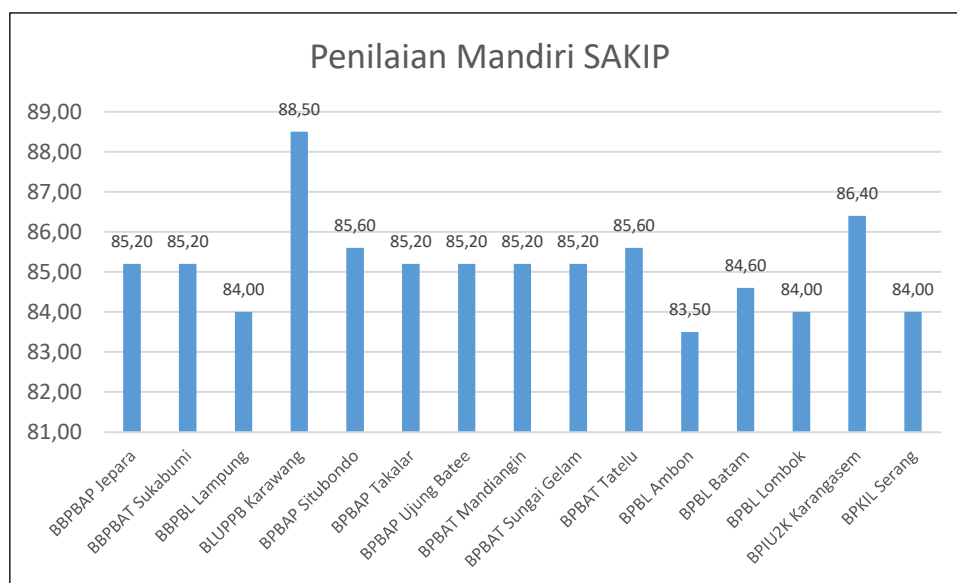
Tabel 18. Capaian Indikator: Nilai penilaian mandiri SAKIP

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
73,58	94,27	97,94	73,50	83,30	84,00	85,20	101,43	102,28

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Nilai penilaian mandiri (PM) SAKIP merupakan indikator kinerja dengan target 84 dan realisasi 85,20 atau tercapai 101,43 %. Pada periode 2020-2022 setiap tahunnya terjadi peningkatan nilai dan melebihi target, di mana penilaian menggunakan rekonsiliasi kinerja dengan melihat aspek Kepatuhan, Kesesuaian, Ketercapaian, dan Ketepatan. Sedangkan 2023-2025 menggunakan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga sulit untuk dibandingkan dengan capaian pada periode tahun 2023-2025. Penilaian pada tahun 2023-2024 ini pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id> dan inspektorat yang melakukan review dan penilaian atas dokumen-dokumen implementasi SAKIP pada periode tertentu.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor B.4387/DJPB.1/TU.210/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025, hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 11. Nilai PM SAKIP unit pelaksana teknis Ditjen PB

Berdasarkan gambar grafik terlihat bahwa seluruh UPT memperoleh predikat A (Memuaskan: 80 – 90). Nilai PM SAKIP tertinggi diperoleh BLUPPB Karawang mencapai 88,5 dan terendah BPBL Ambon hanya sebesar 83,5, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 85,2 berada diposisi ke-5 dengan nilai yang sama dengan BBPAP Jepara, BBPBAT Sukabumi, BPBAP Takalar, BPBAT Mandiangin, BPBAT Sungai Gelam. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan SAKIP dengan baik tidak ada UPT yang cukup atau kurang menerapkan SAKIP.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak terdapat anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ini, karena hasil kinerja seluruh kegiatan akan mendukung aspek penilaian, jadi anggarannya melekat pada seluruh kegiatan yang menjadi aspek penilaian dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian indikator.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan capaian yaitu 1) Segera memenuhi dan melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi dalam implementasi SAKIP; 2) Mempertahankan nilai

implementasi SAKIP tetap optimal; 3) Monitoring dan evaluasi pemenuhan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan tim pengelola kinerja.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. 1) Segera memenuhi dan melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi dalam implementasi SAKIP; 2) Mempertahankan nilai implementasi SAKIP tetap optimal; 3) Monitoring dan evaluasi pemenuhan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan tim pengelola kinerja.

IK-10: Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan.
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Prilaku kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 19. Capaian Indikator: Indeks profesionalitas ASN

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
80,81	75,23	81,62	88,88	86,32	81,00	85,64	105,73	99,21

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPAP Ujung Batee tahun 2025 mampu mencapai 85,64 atau tercapai 105,73 % dari target 81. Capaian IP ASN di tahun 2025 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mampu mencapai 88,88 tahun 2023 dan 86,32 tahun 2024. Dalam kurun waktu 2020 s.d 2025 terlihat IP ASN BPAP Ujung Batee mengalami naik turun, capaian tertinggi berada pada tahun 2023 dan capaian terendah pada tahun 2021.

Indeks Profesionalitas ASN Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, mengacu pada surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budi daya Nomor B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, hal Capaian IKU IP-ASN Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 12. Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis

Indeks profesionalitas ASN unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Budi Daya masing-masing memperoleh predikat Tinggi (nilai 81 – 90), tidak ada yang mendapat predikat Sangat Tinggi (nilai 91-100). Indeks profesionalitas ASN tertinggi yaitu 89,27 oleh BPBL Lampung, kemudian terendah yaitu 81,63 oleh BPBL Lombok, sedangkan BPAP Ujung Batee dengan nilai 85,64 berada diposisi ke-7 dengan nilai yang sama dengan BPBL Ambon. Dengan demikian seluruh UPT memiliki profesionalitas ASN yang tinggi, tidak ada UPT yang memiliki cukup atau kurang profesionalitas ASN.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian

kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah mengingatkan pegawai untuk segera melaporkan setelah selesai diklat untuk rekapitulasi secara manual oleh personil monitoring IP-ASN.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti. Update data diklat/seminar masih dilakukan secara manual.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Memantau ketersediaan diklat maupun seminar pada media-media yang ada, dan jika relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing ASN akan menyarankan untuk mengikuti diklat maupun seminar tersebut.

IK-11: Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPAP Ujung Batee

Persentase penyelesaian LHP BPK atas BPAP Ujung Batee merupakan persentase penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BPAP Ujung Batee sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/diselesaikan oleh BPAP Ujung Batee. Kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian indikator dihitung berdasarkan jumlah temuan pada LHP yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah temuan pada LHP.

Tabel 20. Capaian Indikator: Persentase penyelesaian temuan BPK

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (persen)	2021 (persen)	2022 (persen)	2023 (persen)	2024 (persen)	Target (persen)	Realisasi (persen)	Capaian (%)	
97,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada Tahun 2025, realisasi presentase penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas satker BPAP Ujung Batee adalah 100,00%. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada temuan maka dianggap tuntas semua penyelesaian semua temuan karena tidak ada temuan pada tahun 2024 dan 2025. Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan sistem pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh BPAP Ujung Batee sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2024, yaitu: 1) Memenuhi permintaan dokumen BPK; dan 2) Melakukan tindak lanjut penyelesaian atas LHP BPK.

Data *time series* menunjukkan bahwa adanya perbaikan tindak lanjut penyelesaian LHP BPK oleh BPAP Ujung, hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 tindak lanjut penyelesaian hanya 97,64 %, kemudian tahun 2021 s.d 2025 mampu tuntas ditindaklanjuti menjadi 100 %.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI, bahwa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yaitu BBPBAT Sukabumi, BPAP Situbondo, dan BLUPPB Karawang telah menyelesaikan temuan, sementara UPT lainnya tidak adanya temuan maka dianggap telah menyelesaikan temuan.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tetap melakukan monitoring terhadap rekomendasi maupun tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar jika ada temuan BPK dapat segera diselesaikan.

IK-12: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPAP Ujung Batee

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan merupakan pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPAP Ujung Batee berdasarkan pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPAP Ujung Batee yang menjadi objek pengawasan inspektorat jenderal. Capaian indikator dihitung berdasarkan hasil dokumen tindak lanjut yang telah tuntas diselesaikan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang dilakukan dalam satuan persen. Jika tidak ada rekomendasi maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target sebesar seratus persen.

Tabel 21. Capaian Indikator: Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (persen)	2021 (persen)	2022 (persen)	2023 (persen)	2024 (persen)	Target (persen)	Realisasi (persen)	Capaian (%)	
22,22	92,00	100,00	96,43	100,00	85,00	98,28	115,62	98,28

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Pada tahun 2025 realisasi indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan sebesar 98,28 (115,629 %). Capaian tahun ini menurun dibanding tahun 2024 yang mampu mencapai 100 %. Rekomendasi sampai dengan Triwulan IV telah ditindak lanjuti 100% oleh BPBAP Ujung Batee (berdasarkan aplikasi SIDAK), tetapi belum ada pengawasan ke BPBAP Ujung Batee maka nilai menggunakan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah dimanfaatkan mengikuti persentase capaian lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yaitu 98,28 %.

Data *time series* menunjukkan bahwa tindak lanjut penyelesaian LHP BPK oleh BPBAP Ujung Batee mengalami naik turun, hal ini dapat dilihat dari tahun 2022-2025, sedangkan tahun 2020 s.d 2022 mengalami peningkatan.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.167/DJPB.1/TU.140/I/2026 tanggal 9 Januari 2026, bahwa BPBAP Ujung Batee dan BPBAT Mandiingin belum ada pengawasan ke BPBAP Ujung Batee dan BPBAT Mandiingin maka nilai menggunakan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah dimanfaatkan mengikuti persentase capaian lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yaitu 98,28 %.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-13: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh satker yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Pengawasan;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (survei 3,20).

Nilai minimal yang diperoleh merupakan hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Tabel 22. Capaian Indikator: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk menuju WBK

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
			79,47	79,47	76,00	79,47	104,57	100,00

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Hasil penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK sebesar 79,47 atau tercapai 104,57 % dari target 76. Capaian ini belum ada perubahan sejak 2023 karena belum ada penilaian terbaru sehingga mengacu pada penilaian terakhir yaitu tahun 2023 dengan nilai sebesar 79,47.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tetap melakukan monitoring hasil rekomendasi maupun tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pembangunan zona integritas di BPBAP Ujung Batee sesuai ekspektasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

IK-14: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee

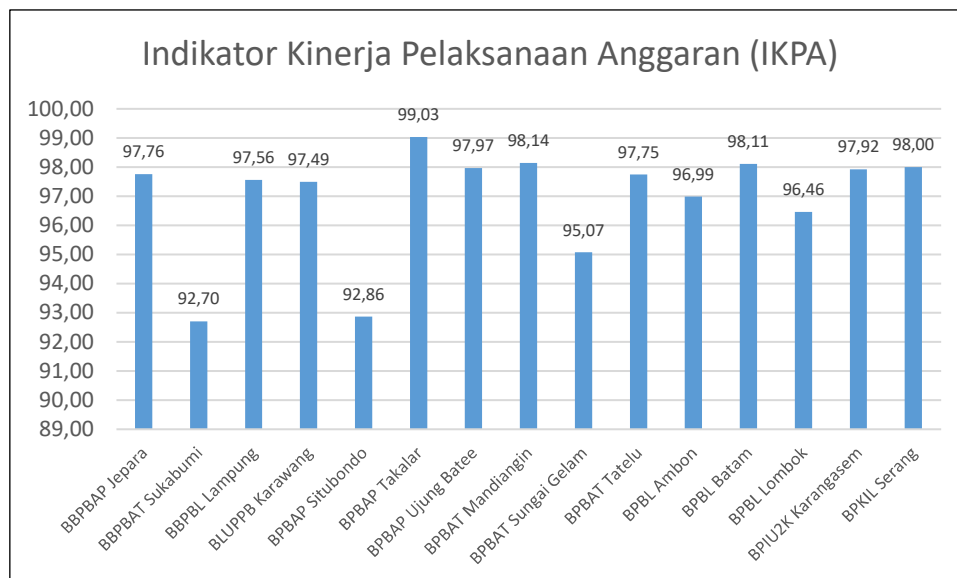
Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (1) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (2) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP), penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabel 23. Capaian Indikator: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
88,57	92,29	91,49	87,62	96,02	92,00	97,97	106,49	102,03

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tahun 2025 ini sebesar 92,97 atau tercapai 106,47 % dari target sebesar 92. Pencapaian tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan-perbaikan pelaksanaan anggaran pada beberapa komponen penilaian. Data time series nilai IKPA BPBAP Ujung Batee mengalami peningkatan, di mana capaian IKPA terakhir pada 2025 sebagai tertinggi sebesar 97,97 sementara awal data tahun 2020 sebesar 88,57, mengalami penurunan hanya di tahun 2023 dan sebagai terendah yaitu hanya sebesar 87,62.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) unit pelaksana teknis

Unit pelaksana teknis memperoleh IKPA tertinggi yaitu BPAP Takalar yaitu 99,03, sedangkan IKPA terendah pada BBP BAT Sukabumi hanya sebesar 92,70. BPAP Ujung Batee dengan nilai 97,97 berada peringkat ke-5 tertinggi dari 15 UPT. Sesuai target sebesar 92 bahwa seluruh unit pelaksana teknis telah mencapai target.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan 1) Menyiapkan revisi POK dengan lebih cermat; 2) Monitoring dan evaluasi nilai IKPA agar realisasi sesuai ekspektasi.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti. Deviasi Hal III DIPA masih menjadi komponen/sub yang belum bisa optimal tiap periodenya.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. 1) Menyiapkan revisi POK dengan lebih cermat; 2) Monitoring dan evaluasi nilai IKPA agar realisasi sesuai ekspektasi.

IK-15: Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPAP Ujung Batee

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu, yang berpedoman pada KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Variabel Efisiensi. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi: a) Penggunaan SBK; dan/atau b) Efisiensi SBK

Nilai kinerja perencanaan anggaran satker BPAP Ujung Batee diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) e-monev anggaran Kementerian Keuangan.

Tabel 24. Capaian Indikator: Nilai kinerja perencanaan anggaran

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
				86,50	71,50	95,00	132,87	109,83

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2023 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Nilai kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 95 atau tercapai sebesar 132,87 % dari target sebesar 71,5. Pencapaian ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2024, sementara tahun 2020-2023 tidak dapat dibandingkan karena belum sebagai target kinerja dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan nota dinas Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 14. Nilai kinerja perencanaan anggaran unit pelaksana teknis

Unit pelaksana teknis memperoleh IKPA tertinggi yaitu 97,50 yang diraih oleh BPBAP Situbondo dan BPBAT Tatelu, sedangkan IKPA terendah pada BPKIL Serang hanya sebesar 72,5. BPBAP Ujung Batee dengan nilai 95 berada peringkat ke-5 tertinggi dari 15 UPT. Sesuai target sebesar 71,5 bahwa seluruh unit pelaksana teknis telah mencapai target.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan tetap melakukan monitoring hasil rekomendasi maupun tindak lanjut.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar NKPA tercapai optimal.

IK-16: Indeks pengelolaan SDM Satker BPAP Ujung Batee

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan

pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

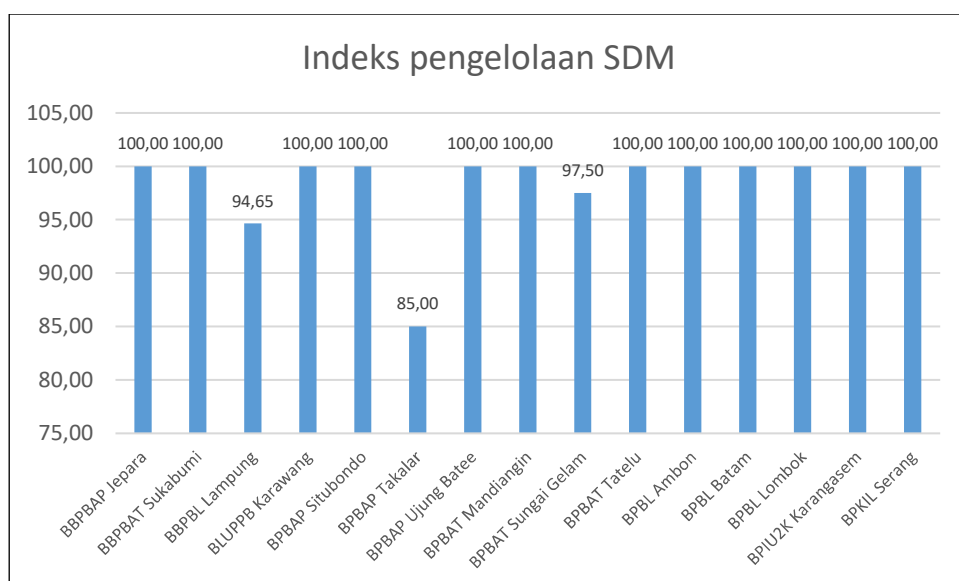
Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).

Tabel 25. Capaian Indikator: Indeks pengelolaan SDM

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (indeks)	2021 (indeks)	2022 (indeks)	2023 (indeks)	2024 (indeks)	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	Capaian (%)	
			6	3	3	6	200	200

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2022 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Indeks pengelolaan SDM tahun 2025 sebesar 6 atau tercapai sebesar 200 % dari target sebesar 3. Pencapaian ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, sementara tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan karena belum sebagai target kinerja dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan surat dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.138/DJPB.1/KP.160/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur, dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 15. Indeks pengelolaan SDM unit pelaksana teknis

Indeks pengelolaan kepegawaian predikat Sangat Baik (nilai 96-100, level 6) sebanyak 14 unit pelaksana teknis. Hanya ada 1 unit pelaksana teknis yang memperoleh predikat Baik (nilai 91-95, level 5) yaitu BPAP Takalar. Dengan demikian seluruh UPT telah melaksanakan pengelolaan SDM sesuai ekspektasi karena nilai indeks terendah pada level rata-rata sesuai target yaitu level indeks 3.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar indeks pengelolaan SDM tercapai optimal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar indeks pengelolaan SDM tercapai optimal.

IK-17: Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPAP Ujung Batee

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *good governance*. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ).

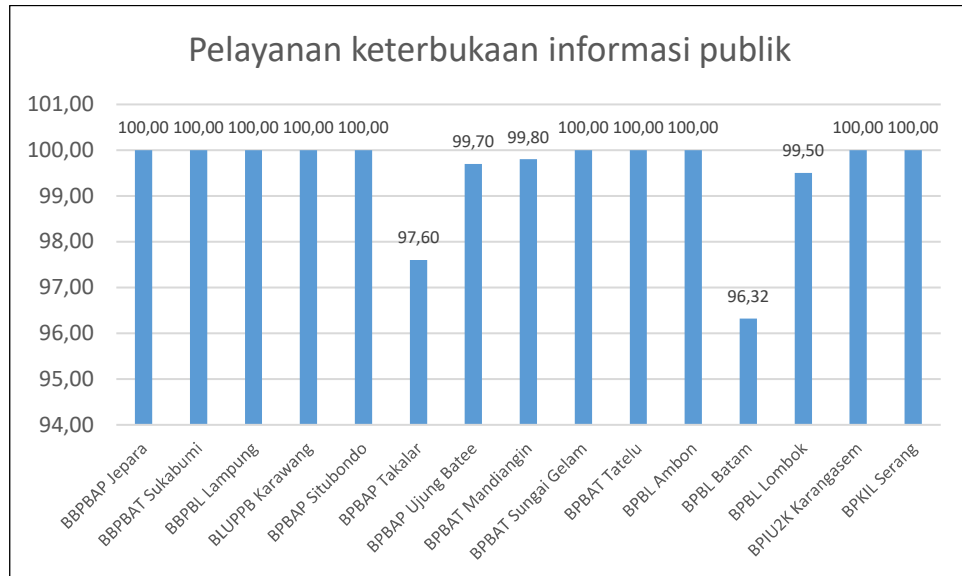
Tabel 26. Capaian Indikator: Pelayanan keterbukaan informasi publik

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
					80,00	99,70	124,63	

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja, sehingga capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi

Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 bahwa diperoleh nilai pelayanan keterbukaan informasi publik pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut.



Gambar 16. Pelayanan keterbukaan informasi publik unit pelaksana teknis

Pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai maksimal 100 diperoleh sebanyak 10 unit pelaksana teknis dari 15 unit pelaksana teknis. Sedangkan terendah dengan nilai 96,32 diperoleh BPBL Batam. Sedangkan BPBAP Ujung Batee memperoleh nilai 99,70 berada di peringkat ke-12 dari 15 unit pelaksana teknis.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar pemenuhan dokumen keterbukaan informasi publik tercapai optimal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pemenuhan dokumen keterbukaan informasi publik tercapai optimal.

IK-18: Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee

Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya. Selain pelayanan internal dalam kegiatan layanan

perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja.

Tabel 27. Capaian Indikator: Persentase layanan perkantoran

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (persen)	2021 (persen)	2022 (persen)	2023 (persen)	2024 (persen)	Target (persen)	Realisasi (persen)	Capaian (%)	
			100	100	80	100	125	100

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2022 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Realisasi sudah melampaui target tahun 2025 yaitu sebesar 125 %. Sama dengan tahun sebelumnya realisasi persentase layanan perkantoran tercapai 100 %. Perbandingan realisasi persentase layanan perkantoran antar UPT Air Payau Lingkup DJPB menunjukkan persentase yang sama yaitu tercapai 100 % untuk semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Layanan perkantoran BPAP Ujung Batee pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.772.965.000 dengan realisasi mencapai Rp 10.681.951.151 atau hamper 100 %. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 komponen yaitu 1) Gaji dan tunjangan sebesar Rp 6.896.673.000; dan 2) Operasional dan pemeliharaan sebesar 3.785.648.000.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan koordinasi dengan baik, monitoring pelaksanaan, dan akan mengusahakan pemrosesan pembayaran dapat diajukan sesegera mungkin.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama Triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Melakukan koordinasi dengan baik, monitoring pelaksanaan, dan akan mengusahakan pemrosesan pembayaran dapat diajukan sesegera mungkin.

IK-19: Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPAP Ujung Batee

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

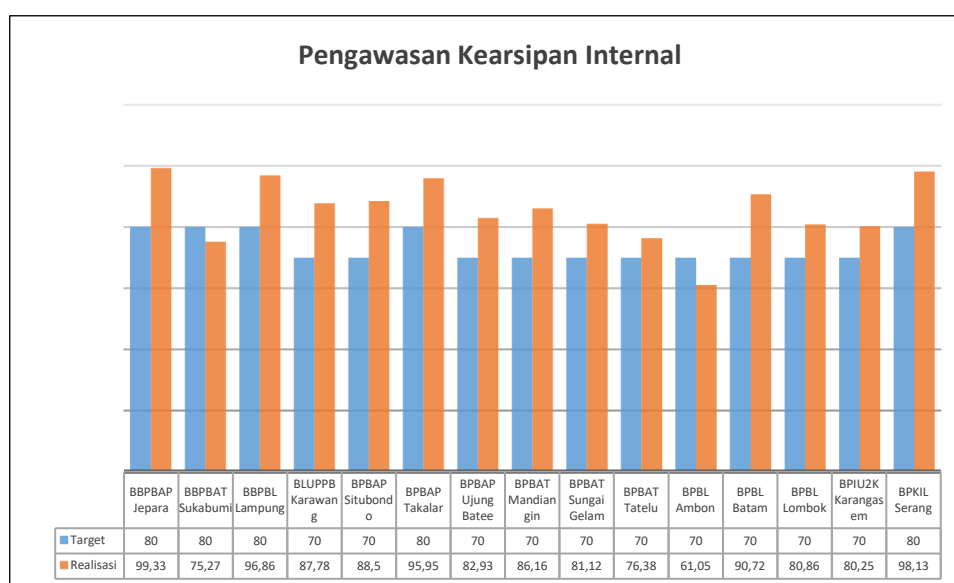
1. Pengelolaan arsip dinamis: penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip.
2. Sumber daya kearsipan: sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana.

Tabel 28. Capaian Indikator: Nilai pengawasan kearsipan internal

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (nilai)	2021 (nilai)	2022 (nilai)	2023 (nilai)	2024 (nilai)	Target (nilai)	Realisasi (nilai)	Capaian (%)	
			68,75	82,94	70,00	82,93	118,47	99,99

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2022 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja. Nilai pengawasan kearsipan internal tahun 2025 sebesar 82,93 atau tercapai sebesar 118,47 % dari target sebesar 70. Pencapaian ini hanya dapat dibandingkan dengan tahun 2023, sementara tahun 2020-2022 tidak dapat dibandingkan karena belum sebagai target kinerja dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan surat dinas Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 bahwa capaian nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai berikut.



Gambar 17. Nilai pengawasan kearsipan internal unit pelaksana teknis

Pengawasan kearsipan pada UPT berkisar antara 61 - 99. Pengawasan kearsipan terendah sebesar 61,05 (predikat B kategori Baik) pada BPBL Ambon dan tertinggi sebesar 99,33 (predikat AA kategori Sangat Memuaskan) pada BBPBAP Jepara, sedangkan BPBAP Ujung Batee dengan nilai 82,93 (predikat A kategori Memuaskan) berada pada peringkat

ke-9 dari 15 unit pelaksana teknis. Dengan demikian seluruh unit pelaksana teknis telah melaksanakan kearsipan dengan baik tidak ada yang cukup maupun kurang.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Tindak Lanjut Permasalahan Periode Sebelumnya. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar pengawasan kearsipan tercapai optimal.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pengawasan kearsipan tercapai optimal.

IK-20: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPAP Ujung Batee

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 29. Capaian Indikator: Persentase rencana umum pengadaan

Realisasi 2020-2024					2025			Perbandingan 2025 dengan 2024 (%)
2020 (persen)	2021 (persen)	2022 (persen)	2023 (persen)	2024 (persen)	Target (persen)	Realisasi (persen)	Capaian (%)	
					76	100	131,58	

Analisa Indikator dan Perbandingan Capaian. Tahun 2020-2024 indikator kinerja ini belum diakomodir dalam perjanjian kinerja, sehingga capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi persentase

layanan perkantoran antar UPT Air Payau Lingkup DJPB menunjukkan persentase yang sama yaitu tercapai 100 % untuk semua UPT Air Payau lingkup DJPB.

Anggaran dan Realisasi Pendukung. Tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk indikator ini mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan di perjanjian kinerja, anggaran tersebar di beberapa kegiatan lain yang dianggap mendukung pencapaian indikator ini.

Permasalahan dalam Pencapaian Indikator. Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.

Rencana Aksi Periode Berikutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan baik, monitoring pelaksanaan, dan akan mengusahakan melengkapi dan menginput paket pengadaan barang/ jasa dengan cermat.

3.3. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur Ditjen Perikanan Budidaya sehingga berpengaruh terhadap struktur aktivitas/kegiatan pada sistem penganggaran. Sehingga pada tahun 2025 tidak ada lagi kegiatan pengelolaan perbenihan, kawasan dan kesehatan ikan, produksi dan usaha, serta pakan dan obat ikan, digantikan dengan pengelolaan budi daya ikan air payau, ikan air laut, dan ikan air tawar.

Alokasi APBN tahun 2025 pada BPBAP Ujung Batee semula sebesar Rp 17.194.338.000, kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perubahan pada belanja pegawai sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp 16.926.432.000. Sedangkan pada tahun 2024 mengelola anggaran mencapai sebesar Rp 24.754.464.000. Jika dibandingkan, alokasi anggaran tahun 2021-2025 mengalami penurunan. Tahun 2025 menjadi pagu anggaran terendah dalam rentang tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025.

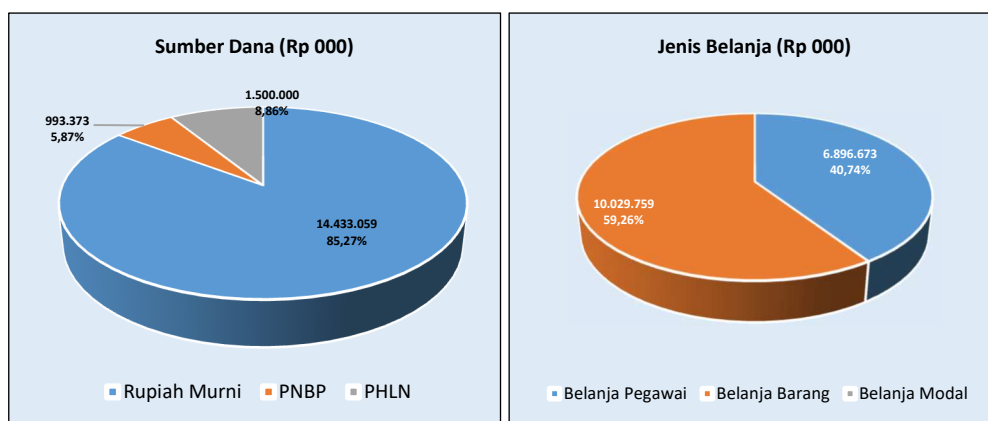
Tabel 30. Pagu anggaran tahun 2021-2025

Aktivitas/Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp 000)	Anggaran 2024 (Rp 000)	Anggaran 2023 (Rp 000)	Anggaran 2022 (Rp 000)	Anggaran 2021 (Rp 000)
Pengelolaan Perbenihan Ikan (2344)		3.859.888	4.506.581	2.712.761	4.744.920
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan (2345)		1.234.433	11.472.463	2.093.262	14.796.227
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan (2346)		7.080.000	7.429.000	3.500.000	2.698.400
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348)	10.720.191	11.835.773	11.244.282	10.675.751	9.767.689
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747)		744.370	659.576	592.324	1.831.587
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau (7022)	2.917.448				

Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut (7023)	174.722				
Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar (7024)	3.114.071				
Total Anggaran	16.926.432	24.754.464	35.311.902	19.574.098	33.838.823

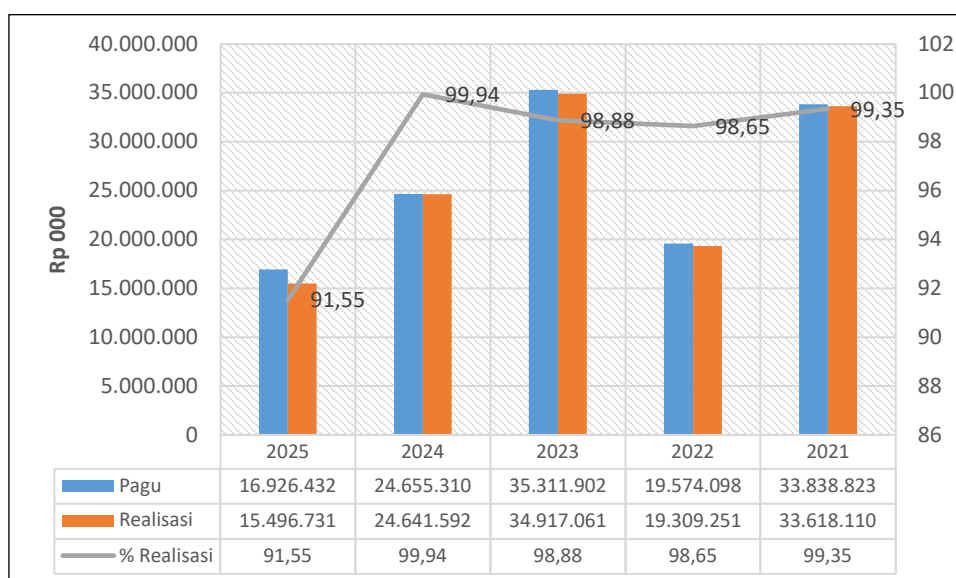
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PB (2348) menjadi yang tertinggi alokasi anggarannya selama periode 2021-2025. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan (5747) sebagai terendah sepanjang tahun 2021-2024, dan Pengelolaan Budi Daya Air Laut pada tahun 2025.

Tahun 2025 belanja barang mendapatkan alokasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja pegawai maupun belanja modal, yaitu 59,26 % dari total anggaran. Selain itu sumber dana belanja terdiri dari Rupiah Murni sebesar 85,27 %, PNBP sebesar 5,87 %, dan ada sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) mencapai 8,86 %.



Gambar 18. Alokasi jenis belanja dan sumber dana belanja tahun 2025

Data *time series* 2021-2025 menunjukkan pagu anggaran setiap tahunnya mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



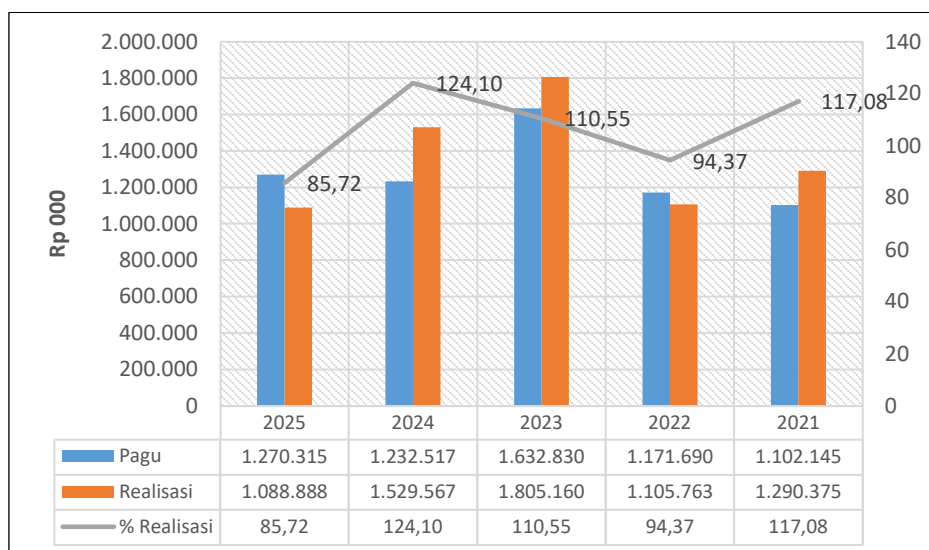
Gambar 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Selama periode pengamatan nilai pagu anggaran tertinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar 35 milyar dan terendah pada 2025 hanya sebesar 16 milyar. Sedangkan realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2024 mencapai 99,94 % dari total pagu anggaran 24 miliar rupiah, sementara terendah pada tahun 2025 hanya sebesar 91,55 % dari total pagu anggaran 16 milyar rupiah. Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2025 disebabkan adanya pagu anggaran yang diblokir tidak bisa dibelanjakan sebesar Rp 1.428.284.000.

Selanjutnya dari sisi penerimaan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dasar hukum pemungutan PNBP pada BPAP Ujung Batee yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumber PNBP BPAP Ujung Batee berasal dari:

- 1) Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yaitu PNBP yang berasal dari pungutan perikanan. Pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha budidaya Perikanan.
- 2) PNBP Non SDA yaitu PNBP yang berasal dari penjualan hasil usaha budidaya dan imbalan jasa UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. PNBP ini terdiri dari: (i) Penjualan hasil Perikanan Budidaya; (ii) Imbal Jasa Teknologi; (iii) Jasa Desiminasi; (iv) Jasa Penggunaan Laboratorium; (v) Jasa Penggunaan fasilitas; (vi) Jasa Fasilitas Lainnya; dan (vii) Jasa Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Data *time series* 2021-2025 menunjukkan target PNBP mengalami naik turun, seperti ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 20. Target dan Realisasi PNBP Tahun 2021-2025



Tahun 2025 BPAP Ujung Batee ditargetkan PNBPN sebesar Rp 1.270.315.000, dengan realisasi mencapai 85,72 % atau Rp 1.088.887,502. Selama tahun 2021-2025 target PNBPN mengalami penurunan dan peningkatan, dimana selama 2021-2022 mengalami penurunan, kemudian tahun 2023 mengalami peningkatan, selanjutnya penurunan tiap tahun mulai 2023 sampai 2025. Target PNBPN tertinggi pada tahun 2023 mencapai sebesar 1,6 milyar rupiah sedangkan terendah tahun 2021 hanya sebesar 1,1 milyar. Sementara itu target tidak tercapai terjadi pada tahun 2022 hanya tercapai 94,37 % dari target dan tahun 2025 hanya tercapai 85,72 % dari target.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) BPAP Ujung Batee Tahun 2025 menyajikan capaian indikator kinerja selama Januari s.d Desember 2025. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi BPAP Ujung Batee Tahun 2025, dari total 20 indikator kinerja, sebanyak 19 indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada dan hanya 1 indikator kinerja yang tidak memenuhi target tahun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPAP Ujung Batee Tahun 2025 ini antara lain adanya kebijakan efisiensi anggaran dimana sebagian anggaran kegiatan diblokir tidak dapat dicairkan sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan satuan kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 31. Kendala dan rencana aksi 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Permasalahan dalam Pencapaian Target	Rencana aksi
1.	Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPAP Ujung Batee	15	Unit	Terjadi banjir di beberapa lokasi : Aceh Utara, Langsa dan Kalimantan Barat sehingga menghambat pengerjaan pembangunan bioflok	Merekomendasikan agar peralatan dan bahan bioflok yang tidak berkaitan dengan lokasi (pengerjaan fisik) agar segera diadakan dan ditip disekitar lokasi kelompok (lokasi yang tidak terdampak banjir) sehingga memudahkan mobilisasi bahan material dan bahan lainnya pada saat banjir surut.
2.	Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	1.847	Ekor	Efisiensi anggaran sangat berdampak terhadap capaian Calin Ikan kakap, sehingga dilakukan cut off untuk menyesuaikan jumlah pakan ikan segar yang tersedia. Pemberian Pakan yang belum maksimal, juga mengakibatkan bobot ikan mengalami pelambatan pertumbuhan dari bobot ideal atau yang standar. Perlu dilakukan kaji ulang untuk menyesuaikan jumlah terget dan capaian yang selaras dengan biaya pendukung yang dibutuhkan	Pemeliharaan calin ikan kakap membutuhkan jumlah pakan yang cukup sehingga asupan gizi juga maksimal, jumlah dan kualitas pakan Calin Ikan kakap harus terpenuhi secara kontinyu. Kualitas pakan harus masuk kategori ikan segar. Penghematan anggaran sangat berdampak terhadap capaian IKU sehingga untuk periode berikutnya perlu penyesuaian antara target IKU dan sistem penganggaran secara maksimal
3.	Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	2.504.380	Ekor	Produksi masih rendah dikarenakan telur induk bandeng masih terbatas. Terbatasnya anggaran tidak bisa melakukan tindak lanjut yang telah di rekomendasikan.	Peningkatan produksi telur ikan bandeng, peningkatan tingkat fertilisasi telur ikan bandeng. Untuk melakukan tindak lanjut yang telah di rekomendasikan di lakukan penganggaran ulang dan membuat perencanaan dari awal.
4.	Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang	20.176	Ekor	Produksi Calin udang Pada triwulan IV, terlihat capaian progres sudah sangat signifikan, pemeliharaan calin udang membutuhkan proses	Target perbaikan capaian dapat dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan calon induk udang lebih awal dilakukan, mulai dari pemesanan



No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Permasalahan dalam Pencapaian Target	Rencana aksi
	diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee			yang panjang untuk mencapai bobot maksimal yang dipersyaratkan, selain itu akses mendapatkan benih Calin Udang sangat terbatas	benur calin udang, persiapan wadah dan penebaran pada awal Triwulan I, sehingga target dapat tercapaian pada TW II. Hal ini juga sebagai antisipasi jika terjadi serangan penyakit, sehingga masih ada waktu untuk melakukan pemeliharaan untuk tahap ke II.
5.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.465	Kg	Terbatasnya anggaran tidak bisa melakukan tindak lanjut yang telah di rekomendasikan.	Untuk melakukan tindak lanjut yang telah di rekomendasikan di lakukan pengagaran ulang dan membuat perencanaan dari awal.
6.	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	469	Sampel	Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target pada TW IV, pelayanan pengujian sampel penyakit ikan air payau tetap berlangsung sebagai pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Ujung Batee	Melanjutkan proses pengujian sampel berdasarkan ruang lingkup dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Ujung Batee
7.	Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee	14	Sampel	Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target pada TW IV karena target capaian pengujian antimikrobia resisten telah tercapai pada TW III	Melakukan pengambilan dan pengujian sampel antimikrobia resisten sesuai perencanaan
8.	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	29.121	Ekor	Menurunnya produksi dikarenakan dilakukan penurunan padat tebar ikan. karena tidak normalnya generator set di dalam mensuplai oksigen maka terjadi tidak maksimal dari hasil produksi pembenihan seperti yang telah di rekomendasikan.	melakukan peningktana padat tebar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Harus membuat perencanaan dari awal harus baik sehingga sampai akhir kegiatan, kegiatan berjalan dengan lancar.
9.	Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai	Selama triwulan ketiga 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	1) Segera memenuhi dan melengkapi dokumen tindak lanjut rekomendasi dalam implementasi SAKIP; 2) Mempertahankan nilai implementasi SAKIP tetap optimal; 3) Monitoring dan evaluasi pemenuhan secara periodik dan melakukan koordinasi dengan tim pengelola kinerja.
10.	Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	Indeks	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti. Update data diklat/seminar masih dilakukan secara manual.	Memantau ketersediaan diklat maupun seminar pada media-media yang ada, dan jika relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing ASN akan menyarankan untuk mengikuti diklat maupun seminar tersebut
11.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar jika ada temuan BPK dapat segera diselesaikan
12.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini.	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
13.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit	76	Nilai	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pembangunan zona integritas di BPBAP Ujung Batee sesuai

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Permasalahan dalam Pencapaian Target	Rencana aksi
	kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPAP Ujung Batee			yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	ekspektasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPAP Ujung Batee	92,00	Nilai	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	1) Menyiapkan revisi POK dengan lebih cermat; 2) Monitoring dan evaluasi nilai IKPA agar realisasi sesuai ekspektasi.
15.	Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPAP Ujung Batee	71,50	Nilai	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar NKPA tercapai optimal.
16.	Indeks pengelolaan SDM Satker BPAP Ujung Batee	3	Indeks	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar indeks pengelolaan SDM tercapai optimal.
17.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPAP Ujung Batee	80	Nilai	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pemenuhan dokumen keterbukaan informasi publik tercapai optimal
18.	Persentase layanan perkantoran Satker BPAP Ujung Batee	80	Persen	Selama Triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Melakukan koordinasi dengan baik, monitoring pelaksanaan, dan akan mengusahakan pemrosesan pembayaran dapat diajukan sesegera mungkin
19.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPAP Ujung Batee	70	Nilai	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan baru yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi agar pengawasan kearsipan tercapai optimal
20.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPAP Ujung Batee	76	Persen	Selama triwulan keempat 2025 belum ditemukan permasalahan yang berarti dalam pencapaian indikator kinerja ini	Rencana aksi yang akan dilakukan pada periode selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan baik, monitoring pelaksanaan, dan akan mengusahakan melengkapi dan menginput paket pengadaan barang/ jasa dengan cermat.

Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi pusat maupun instansi lain, khususnya pada pelaksanaan kegiatan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja;
3. Monitoring dan evaluasi melalui rapat pengendalian rutin pada setiap minggu pertama bulan berjalan, dengan harapan dapat diambil rencana aksi dan dilakukan tindak mengatasi kendala-kendala.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Manijo**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	11
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2. Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	1.379
	3. Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	22.141
	4. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	794.150
	5. Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	7.546.247
	6. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)	10.991
	7. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	615
	8. Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	8
	9. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10. Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	199
	11. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	84.586
	12. Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee (Orang)	300
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	13. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	84
	14. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	15. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	85
	17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembatalan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	92
	19. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71,5
	20. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3
	21. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	≥ 80
	22. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	23. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	70
	24. Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	65

Jakarta, 11 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	3.596.782.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	861.246.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.230.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	10.506.310.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2025		17.194.338.000

Jakarta, 11 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Manijo

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan Kepala)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE
JALAN LAKSAMANA MALAHAYATI KM.16 DURUNG, ACEH BESAR 23381
TELEPON 08116811448
LAMAM www.kkp.go.id SUREL spbpapub.aceh@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik
Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	11
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2. Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	1.379
	3. Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	22.141
	4. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	794.150
	5. Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	7.546.247
	6. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)	10.991
	7. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	615
	8. Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	8
	9. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10. Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	199
	11. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	84.586
	12. Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee (Orang)	300
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	13. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	84
	14. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	15. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	85
	17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	92
	19. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71,5
	20. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3
	21. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	≥ 80
	22. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	23. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	70
	24. Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	65

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik
Wawan Cahyono Ashuri

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	3.596.782.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	861.246.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.230.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	10.506.310.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2025		17.194.338.000

Jakarta, 28 Juli 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik
Wawan Cahyono Ashuri

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Perubahan Akhir)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	15
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2. Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	1.847
	3. Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	2.504.380
	4. Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	20.176
	5. Pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)	10.465
	6. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	469
	7. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	8. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	29.121
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	9. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	84
	10. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	81

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	11. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100
	12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	85
	13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	76
	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	92
	15. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	71,5
	16. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	3
	17. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	≥ 80
	18. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	80
	19. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	70
	20. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	76

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	2.917.448.000
2.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	174.722.000
3.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	3.114.071.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	10.720.191.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Tahun 2025		16.926.432.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Lampiran 4. Matrik Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja 2025

MATRIK PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

SEMULA			MENJADI			KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SATUAN	
1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	11	Unit	1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	15	Unit	Volume target bertambah
2. Produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	1.379	Ekor				Dihapus
3. Produksi calon induk unggul udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Ujung Batee	22.141	Ekor	4. Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee	20.176	Ekor	- Kalimat IKU berubah dan dipisah; - Volume target berkurang
			2. Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	1.847	Ekor	- Kalimat IKU berubah dan dipisah; - Volume target berkurang
4. Benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	794.150	Ekor	3. Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat	2.504.380	Ekor	- Kalimat IKU berubah dan digabung; - Volume target berkurang
5. Benih udang yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	7.546.247	Ekor				
6. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.991	Kg	5. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	10.465	Kg	Volume target berkurang
7. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	615	Sampel	6. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBAP Ujung Batee	469	Sampel	Volume target berkurang
8. Sampel pakan dan obat ikan yang diuji Satker BPBAP Ujung Batee	8	Sampel				Dihapus
9. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee	14	Sampel	7. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee	14	Sampel	Tetap
10. Produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee	199	Ekor				Dihapus
11. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	84.586	Ekor	8. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee	29.121	Ekor	Volume target berkurang
12. Diseminasi teknologi pembesaran ikan Satker BPBAP Ujung Batee	300	Orang				Dihapus
13. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai	9. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee	84	Nilai	Tetap
14. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	Indeks	10. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee	81	Indeks	Tetap
15. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen	11. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee	100	Persen	Tetap
16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen	12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker BPBAP Ujung Batee	85	Persen	Tetap
17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai	13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung Batee	76	Nilai	Tetap
18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92	Nilai	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee	92	Nilai	Tetap
19. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,5	Nilai	15. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee	71,5	Nilai	Tetap
20. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	Indeks	16. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee	3	Indeks	Tetap

SEMULA				MENJADI			KETERANGAN	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	SATUAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		SATUAN
21.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	17.	Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee	80	Nilai	Tetap
22.	Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	Persen	18.	Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee	80	Persen	Tetap
23.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	Nilai	19.	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee	70	Nilai	Tetap
24.	Persentase penyelesaian SOP Satker BPBAP Ujung Batee	65	Persen					Dihapus
				20.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee	76	Persen	IKU baru

**BERITA ACARA REVIU
LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU
UJUNG BATEE**

Pada hari Jumát tanggal 23 Januari 2026 telah dilaksanakan **Reviu Singkat Laporan Kinerja triwulan IV Tahun 2025** di lingkup **Ditjen Perikanan Budi Daya** dengan hasil reviu sebagaimana terlampir. Reviu dilakukan secara singkat dengan berpedoman pada Permen PAN RB No 88 Tahun 2021. Beberapa catatan telah dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan reviu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 23 Januari 2026

Tim Reviu
Laporan Kinerja DJPB


(Ida Widaningsih)
Analisis Kebijakan Muda



Perwakilan Unit Kerja
yang dilakukan Reviu


(Wawan Cahyono Ashuri)
Kepala BPBAP Ujung Batee

Tim Reviu
Laporan Kinerja DJPB


(Cindy Adam)
Pengelola Layanan
Operasional

Lampiran Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Level II
Unit Kerja Eselon II/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direviu : Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Bateex
Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

KERTAS KERJA REVIU LAPORAN KINERJA LEVEL II

1. Aspek Kesesuaian Format Pelaporan

No.	Uraian	Minimum Informasi yang Disajikan*	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6
1	Kata Pengantar	Laporan telah disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja	Laporan telah disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja pada tanggal 15 Januari 2026	Tambahkn lembar verif LKj	Surah ditambahkan
2	Ringkasan Executive	: menyajikan ringkasan capaian kinerja organisasi dan upaya perbaikan kedepan	Telah menyajikan ringkasan capaian kinerja organisasi dan upaya perbaikan kedepan		
3	Bab 1	: menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada Aspek Strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi oleh organisasi Catatan : memastikan isu strategis di wilayah kerjanya	Telah menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada Aspek Strategis organisasi dan menyajikan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi oleh organisasi		Isu strategis telah diuraikan pada sub bab 1.5 Potensi dan Permasalahan
4	Bab 2	: menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 Catatan : dijelaskan jika ada perubahan perjanjian kinerja. Pastikan PK sebelum dan setelah revisi dicantumkan dalam lampiran	Telah menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 dan sudah menyajikan hasil analisa perbedaan indikator kinerja atau target yang tercantum dalam PK dengan target atau indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Ditjen Perikanan Budi Daya	Pengukuran sudah tidak menggunakan BSC lagi, belum adanya perbandingan PK sebelum dan setelah revisi	Perubahan PK sudah dijelaskan pada sub bab 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025 paragraf 1 dan 2, dan juga sudah dijelaskan detail perubahan indikator ada pada lampiran. Pengukuran menggunakan BSC sudah tidak ada lagi di sub bab 2.3 tersebut
5	Bab 3	: menyajikan informasi tentang : a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran	Telah menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, perbandingan TW sebelumnya		

No.	Uraian	Minimum Informasi yang Disajikan*	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6
		Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	dengan target akhir RENSTRA, perbandingan dengan satker setara di iku yg sama, dan Realisasi Anggaran, serta rencana aksi kedepan.		
6	Bab 4	: Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	Telah menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan juga sudah menyajikan langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.		
7	Data Dukung	1. Perjanjian Kinerja tahun 2025 (awal dan revisi)	Ada		
		2. Penghargaan yang diterima unit kerja	Tidak Ada		
		3. Informasi lain yang diperlukan untuk mendukung Pelaporan Kinerja	Data dukung LKj sudah ada, tetapi belum dilengkapi dengan dokumen pendukung keterlibatan pimpinan dalam capaian kinerja	Perlu melengkapi dengan dokumen pendukung keterlibatan pimpinan dalam capaian kinerja	Sudah diupload pada Google Drive folder Data Dukung LKj > Triwulan IV Tahunan

Keterangan :

Kolom 3. merupakan minimum informasi yang harus disajikan dalam Laporan Kinerja

Kolom 4. diisi oleh Tim Reviu dengan hasil reviu misalya telah menyajikan informasi minimum yang dipersyaratkan

Kolom 5. diisi oleh Tim Reviu dengan Hal-Hal yang perlu diperbaiki dengan tetap memperhatikan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja kepada Kementerian PAN dan RB melalui Aplikasi Esakip Reviu

Kolom 6. diisi oleh Tim Reviu dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan sebelum disampaikan ke Kementerian PA

2. Aspek Kesesuaian Data Capaian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kesesuaian Data Capaian Kinerja		
			Laporan Kinerja	Aplikasi Kinerjaku	Data Dukung
1	2	3	4	5	6
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1. Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Unit)	15	15	15
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2. Jumlah bantuan calon induk unggul ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	2.000	2.000	2.000
		3. Jumlah bantuan benih ikan air payau/udang yang disalurkan ke masyarakat (Ekor)	2.540.859	2.540.859	2.540.859
		4. Jumlah calon induk unggul udang dan atau ikan konsumsi ikan air payau yang diproduksi UPT BPBAP Ujung Batee (Ekor)	22.330	22.330	22.330
		5. Pakan ikan air payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Ujung Batee (Kg)	0	0	0
		6. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium	700	700	700
		7. Pengujian antimicrobial resistance Satker BPBAP Ujung Batee (Sampel)	14	14	14
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	8. Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBAP Ujung Batee (Ekor)	200.650	200.650	200.650
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPBAP Ujung Batee	9. Nilai penilaian mandiri SAKIP Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	85,20	85,20	85,20
		10. Indeks profesionalitas ASN Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	85,64	85,64	85,64
		11. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	100	100
		12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	98,28	98,28	98,28

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kesesuaian Data Capaian Kinerja		
			Laporan Kinerja	Aplikasi Kinerjaku	Data Dukung
1	2	3	4	5	6
		13. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBAP Ujung	79,47	79,47	79,47
		14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	97,97	97,97	97,97
		15. Nilai kinerja perencanaan anggaran Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	95,00	95,00	95,00
		16. Indeks pengelolaan SDM Satker BPBAP Ujung Batee (Indeks)	6	6	6
		17. Pelayanan keterbukaan informasi publik Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	99,70	99,70	99,70
		18. Persentase layanan perkantoran Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	100	100
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBAP Ujung Batee (Nilai)	82,93	82,93	82,93
		20. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAP Ujung Batee (Persen)	100	100	100

Keterangan :

Kolom 2. diisi dengan nomenklatur sasaran kegiatan

Kolom 3. diisi dengan nomenklatur indikator kinerja

Kolom 4. diisi dengan capaian indikator kinerja dalam laporan kinerja

Kolom 5. diisi dengan capaian indikator kinerja dalam aplikasi kinerjaku

Kolom 6. diisi dengan capaian indikator kinerja yang tercantum dalam data dukung

3. Aspek Pengungkapan Informasi Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Permen PAN No 88 Tahun 2021					
No	Indikator Kinerja	Pemenuhan Minimum Informasi Kinerja	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1.	2.	3.	4	5.	6.
1.					
		1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	Telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini		
		2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Catatan :	Telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan persentase perbandingannya.		
		3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)	Telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra	.	
		4 membandingkan realisasikinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	Telah membandingkan realisasi kinerja dengan standar satker lainnya	.	
		5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Telah mencantumkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan		

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Permen PAN No 88 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan Minimum Informasi Kinerja	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1.	2.	3.	4	5.	6.
		6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, Anggaran, dll)	Telah mencantumkan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.		
		7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Telah mencantumkan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.		

Aquaculture is future



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE

Jalan Laksamana Malahayati Km. 16 Ujung Batee, Mesjid Raya, Kab Aceh Besar, Prov Aceh

Telepon : 08116811448 | email : tu.bbapub@gmail.com

<https://kkp.go.id/djpb/bpbapujungbatee>